S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 87/Permentan/SR.130/12/2011

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140 /4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/ 8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);

Memperhatikan : 1. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang di wakili oleh Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;

2. Hasil Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Pupuk Tahun 2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 sampai dengan 16 September 2011;

3. Risalah Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Pupuk Tahun Anggaran 2012, tanggal 30 Nopember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
15. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
16. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Penyalur di Lini IV adalah pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
21. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2012.

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada awal bulan Januari 2012.

(5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

(6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Pebruari 2012.

(7) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan.

(8) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.

(2) Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

(3) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

(4) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

(5) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.

(6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:

   a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;

   b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah;

   c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

(1) Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pengawasan dan supervisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.

(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

(1) KPPP di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.

(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

(3) KPPP di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Lampiran 3.13. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	8,800	801	739	730	818	739	686	678	660	686	704	774	783
2	SUMATERA UTARA	53,000	4,823	4,452	4,399	4,929	4,452	4,134	4,081	3,975	4,134	4,240	4,664	4,717
3	SUMATERA BARAT	21,000	1,911	1,764	1,743	1,953	1,764	1,638	1,617	1,575	1,638	1,680	1,848	1,869
4	J A M B I	4,600	419	386	382	428	386	359	354	345	359	368	405	409
5	R I A U	5,200	473	437	432	484	437	406	400	390	406	416	458	463
6	BENGKULU	3,600	328	302	299	335	302	281	277	270	281	288	317	320
7	SUMATERA SELATAN	7,700	701	647	639	716	647	601	593	578	601	616,	678	685
8	BANGKA BELITUNG	1,800	164	151	149	167	151	140	139	135	140	144	158	160
9	LAMPUNG	17,500	1,593	1,470	1,453	1,628	1,470	1,365	1,348	1,313	1,365	1,400	1,540	1,558
10	KEP. RIAU	100	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	9
11	DKI. JAKARTA	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	1,800	164	151	149	167	151	140	139	135	140	144	158	160
13	JAWA BARAT	77,700	7,071	6,527	6,449	7,226	6,527	6,061	5,983	5,828	6,061	6,216	6,838	6,915
14	D.I. YOGYAKARTA	12,200	1,110	1,025	1,013	1,135	1,025	952	939	915	952	976	1,074	1,086
15	JAWA TENGAH	186,700	16,990	15,683	15,496	17,363	15,683	14,563	14,376	14,003	14,563	14,936	16,430	16,616
16	JAWA TIMUR	485,000	44,135	40,740	40,255	45,105	40,740	37,830	37,345	36,375	37,830	38,800	42,680	43,165
17	B A L I	9,800	892	823	813	911	823	764	755	735	764	784	862	872
18	KALIMANTAN BARAT	3,800	346	319	315	353	319	296	293	285	296	304	334	338
19	KALIMANTAN TENGAH	700	64	59	58	65	59	55	54	53	55	56	62	62
20	KALIMANTAN SELATAN	1,700	155	143	141	158	143	133	131	128	133	136	150	151
21	KALIMANTAN TIMUR	2,200	200	185	183	205	185	172	169	165	172	176	194	196
22	SULAWESI UTARA	200	18	17	17	19	17	16	15	15	16	16	18	18
23	GORONTALO	150	14	13	12	14	13	12	12	11	12	12	13	13
24	SULAWESI TENGAH	9,000	819	756	747	837	756	702	693	675	702	720	792	801
25	SULAWESI TENGGARA	4,300	391	361	357	400	361	335	331	323	335	344	378	383
26	SULAWESI SELATAN	61,400	5,587	5,158	5,096	5,710	5,158	4,789	4,728	4,605	4,789	4,912	5,403	5,465
27	SULAWESI BARAT	6,100	555	512	506	567	512	476	470	458	476	488	537	543
28	NUSA TENGGARA BARAT	12,150	1,106	1,021	1,008	1,130	1,021	948	936	911	948	972	1,069	1,081
29	NUSA TENGGARA TIMUR	700	64	59	58	65	59	55	54	53	55	56	62	62
30	MALUKU	250	23	21	21	23	21	20	19	19	20	20	22	22
31	PAPUA	500	46	42	42	47	42	39	39	38	39	40	44	45
32	MALUKU UTARA	90	8	8	7	8	8	7	7	7	7	7	8	8
33	IRJA BARAT	250	23	21	21	23	21	20	19	19	20	20	22	22
	JUMLAH PROPINSI	1,000,000	91,000	84,000	83,000	93,000	84,000	78,000	77,000	75,000	78,000	80,000	88,000	89,000

Lampiran 3.14. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	3,745	341	315	311	348	315	292	288	281	292	300	330	333
2	SUMATERA UTARA	22,553	2,052	1,894	1,872	2,097	1,894	1,759	1,737	1,691	1,759	1,804	1,985	2,007
3	SUMATERA BARAT	8,936	813	751	742	831	751	697	688	670	697	715	786	795
4	J A M B I	1,957	178	164	162	182	164	153	151	147	153	157	172	174
5	R I A U	2,213	201	186	184	206	186	173	170	166	173	177	195	197
6	BENGKULU	1,532	139	129	127	142	129	119	118	115	119	123	135	136
7	SUMATERA SELATAN	3,277	298	275	272	305	275	256	252	246	256	262	288	292
8	BANGKA BELITUNG	766	70	64	64	71	64	60	59	57	60	61	67	68
9	LAMPUNG	7,447	678	626	618	693	626	581	573	559	581	596	655	663
10	KEP. RIAU	43	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4
11	DKI. JAKARTA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	766	70	64	64	71	64	60	59	57	60	61	67	68
13	JAWA BARAT	33,064	3,009	2,777	2,744	3,075	2,777	2,579	2,546	2,480	2,579	2,645	2,910	2,943
14	D.I. YOGYAKARTA	5,191	472	436	431	483	436	405	400	389	405	415	457	462
15	JAWA TENGAH	79,446	7,230	6,673	6,594	7,389	6,673	6,197	6,117	5,958	6,197	6,356	6,991	7,071
16	JAWA TIMUR	206,382	18,781	17,336	17,130	19,193	17,336	16,098	15,891	15,479	16,098	16,511	18,162	18,368
17	B A L I	4,170	379	350	346	388	350	325	321	313	325	334	367	371
18	KALIMANTAN BARAT	1,617	147	136	134	150	136	126	125	121	126	129	142	144
19	KALIMANTAN TENGAH	298	27	25	25	28	25	23	23	22	23	24	26	27
20	KALIMANTAN SELATAN	723	66	61	60	67	61	56	56	54	56	58	64	64
21	KALIMANTAN TIMUR	936	85	79	78	87	79	73	72	70	73	75	82	83
22	SULAWESI UTARA	85	8	7	7	8	7	7	7	6	7	7	7	8
23	GORONTALO	64	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6
24	SULAWESI TENGAH	3,830	349	322	318	356	322	299	295	287	299	306	337	341
25	SULAWESI TENGGARA	1,830	167	154	152	170	154	143	141	137	143	146	161	163
26	SULAWESI SELATAN	26,128	2,378	2,195	2,169	2,430	2,195	2,038	2,012	1,960	2,038	2,090	2,299	2,325
27	SULAWESI BARAT	2,596	236	218	215	241	218	202	200	195	202	208	228	231
28	NUSA TENGGARA BARAT	5,170	470	434	429	481	434	403	398	388	403	414	455	460
29	NUSA TENGGARA TIMUR	298	27	25	25	28	25	23	23	22	23	24	26	27
30	MALUKU	106	10	9	9	10	9	8	8	8	8	9	9	9
31	PAPUA	213	19	18	18	20	18	17	16	16	17	17	19	19
32	MALUKU UTARA	38	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
33	IRJA BARAT	106	10	9	9	10	9	8	8	8	8	9	9	9
	JUMLAH PROPINSI	425,529	38,723	35,744	35,319	39,574	35,744	33,191	32,766	31,915	33,191	34,042	37,447	37,872

Lampiran 3.15. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Hortikultura (Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	1,527	139	128	127	142	128	119	118	115	119	122	134	136
2	SUMATERA UTARA	9,197	837	773	763	855	773	717	708	690	717	736	809	819
3	SUMATERA BARAT	3,644	332	306	302	339	306	284	281	273	284	292	321	324
4	J A M B I	798	73	67	66	74	67	62	61	60	62	64	70	71
5	R I A U	902	82	76	75	84	76	70	69	68	70	72	79	80
6	BENGKULU	625	57	52	52	58	52	49	48	47	49	50	55	56
7	SUMATERA SELATAN	1,336	122	112	111	124	112	104	103	100	104	107	118	119
8	BANGKA BELITUNG	312	28	26	26	29	26	24	24	23	24	25	27	28
9	LAMPUNG	3,037	276	255	252	282	255	237	234	228	237	243	267	270
10	KEP. RIAU	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
11	DKI. JAKARTA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	312	28	26	26	29	26	24	24	23	24	25	27	28
13	JAWA BARAT	13,484	1,227	1,133	1,119	1,254	1,133	1,052	1,038	1,011	1,052	1,079	1,187	1,200
14	D.I. YOGYAKARTA	2,117	193	178	176	197	178	165	163	159	165	169	186	188
15	JAWA TENGAH	32,399	2,948	2,722	2,689	3,013	2,722	2,527	2,495	2,430	2,527	2,592	2,851	2,884
16	JAWA TIMUR	84,165	7,659	7,070	6,986	7,827	7,070	6,565	6,481	6,312	6,565	6,733	7,407	7,491
17	B A L I	1,701	155	143	141	158	143	133	131	128	133	136	150	151
18	KALIMANTAN BARAT	659	60	55	55	61	55	51	51	49	51	53	58	59
19	KALIMANTAN TENGAH	121	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	11	11
20	KALIMANTAN SELATAN	295	27	25	24	27	25	23	23	22	23	24	26	26
21	KALIMANTAN TIMUR	382	35	32	32	36	32	30	29	29	30	31	34	34
22	SULAWESI UTARA	35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	GORONTALO	26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	SULAWESI TENGAH	1,562	142	131	130	145	131	122	120	117	122	125	137	139
25	SULAWESI TENGGARA	746	68	63	62	69	63	58	57	56	58	60	66	66
26	SULAWESI SELATAN	10.655	970	895	884	991	895	831	820	799	831	852	938	948
27	SULAWESI BARAT	1.059	96	89	88	98	89	83	82	79	83	85	93	94
28	NUSA TENGGARA BARAT	2,108	192	177	175	196	177	164	162	158	164	169	186	188
29	NUSA TENGGARA TIMUR	121	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	11	11
30	MALUKU	43	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4
31	PAPUA	87	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	8
32	MALUKU UTARA	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	IRJA BARAT	43	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4
	JUMLAH PROPINSI	173,536	15,792	14,577	14,404	16,139	14,577	13,536	13,362	13,015	13,536	13,883	15,271	15,445

Lampiran 3.16. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	3,507	319	295	291	326	295	274	270	263	274	281	309	312
2	SUMATERA UTARA	21,124	1,922	1,774	1,753	1,965	1,774	1,648	1,627	1,584	1,648	1,690	1,859	1,880
3	SUMATERA BARAT	8,370	762	703	695	778	703	653	644	628	653	670	737	745
4	J A M B I	1,833	167	154	152	171	154	143	141	138	143	147	161	163
5	R I A U	2,073	189	174	172	193	174	162	160	155	162	166	182	184
6	BENGKULU	1,435	131	121	119	133	121	112	110	108	112	115	126	128
7	SUMATERA SELATAN	3,069	279	258	255	285	258	239	236	230	239	246	270	273
8	BANGKA BELITUNG	717	65	60	60	67	60	56	55	54	56	57	63	64
9	LAMPUNG	6,975	635	586	579	649	586	544	537	523	544	558	614	621
10	KEP. RIAU	40	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
11	DKI. JAKARTA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	717	65	60	60	67	60	56	55	54	56	57	63	64
13	JAWA BARAT	30,968	2,818	2,601	2,570	2,880	2,601	2,416	2,385	2,323	2,416	2,477	2,725	2,756
14	D.I. YOGYAKARTA	4,862	442	408	404	452	408	379	374	365	379	389	428	433
15	JAWA TENGAH	74,411	6,771	6,251	6,176	6,920	6,251	5,804	5,730	5,581	5,804	5,953	6,548	6,623
16	JAWA TIMUR	193,302	17,590	16,237	16,044	17,977	16,237	15,078	14,884	14,498	15,078	15,464	17,011	17,204
17	B A L I	3,906	355	328	324	363	328	305	301	293	305	312	344	348
18	KALIMANTAN BARAT	1,515	138	127	126	141	127	118	117	114	118	121	133	135
19	KALIMANTAN TENGAH	279	25	23	23	26	23	22	21	21	22	22	25	25
20	KALIMANTAN SELATAN	678	62	57	56	63	57	53	52	51	53	54	60	60
21	KALIMANTAN TIMUR	677	80	74	73	82	74	68	68	66	68	70	77	78
22	SULAWESI UTARA	80	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	7	7
23	GORONTALO	60	5	5	5	6	5	5	5	4	5	5	5	5
24	SULAWESI TENGAH	3,587	326	301	298	334	301	280	276	269	280	287	316	319
25	SULAWESI TENGGARA	1,714	156	144	142	159	144	134	132	129	134	137	151	153
26	SULAWESI SELATAN	24,472	2,227	2,056	2,031	2,276	2,056	1,909	1,884	1,835	1,909	1,958	2,154	2,178
27	SULAWESI BARAT	2,431	221	204	202	226	204	190	187	182	190	194	214	216
28	NUSA TENGGARA BARAT	4,843	441	407	402	450	407	378	373	363	378	387	426	431
29	NUSA TENGGARA TIMUR	279	25	23	23	26	23	22	21	21	22	22	25	25
30	MALUKU	100	9	8	8	9	8	8	8	7	8	8	9	9
31	PAPUA	199	18	17	17	19	17	16	15	15	16	16	18	18
32	MALUKU UTARA	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33	IRJA BARAT	100	9	8	8	9	8	8	8	7	8	8	9	9
	JUMLAH PROPINSI	398,561	36,269	33,479	33,081	37,066	33,479	31,088	30,689	29,892	31,088	31,885	35,073	35,472

Lampiran 3.17. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	21	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9
2	SUMATERA UTARA	126	11.4	10.6	10.4	11.7	10.6	9.8	9.7	9.4	9.8	10.1	11.1	11.2
3	SUMATERA BARAT	50	4.5	4.2	4.1	4.6	4.2	3.9	3.8	3.7	3.9	4.0	4.4	4.4
4	J A M B I	11	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0
5	R I A U	12	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1
6	BENGKULU	9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8
7	SUMATERA SELATAN	18	1.7	1.5	1.5	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6
8	BANGKA BELITUNG	4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
9	LAMPUNG	42	3.8	3.5	3.4	3.9	3.5	3.2	3.2	3.1	3.2	3.3	3.7	3.7
10	KEP. RIAU	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	DKI. JAKARTA	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	BANTEN	4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
13	JAWA BARAT	184	16.8	15.5	15.3	17.2	15.5	14.4	14.2	13.8	14.4	14.8	16.2	16.4
14	D.I. YOGYAKARTA	29	2.6	2.4	2.4	2.7	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6
15	JAWA TENGAH	443	40.3	37.2	36.8	41.2	37.2	34.6	34.1	33.2	34.6	35.4	39.0	39.4
16	JAWA TIMUR	1,151	104.8	96.7	95.5	107.1	96.7	89.8	88.6	86.3	89.8	92.1	101.3	102.4
17	B A L I	23	2.1	2.0	1.9	2.2	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1
18	KALIMANTAN BARAT	9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
19	KALIMANTAN TENGAH	2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20	KALIMANTAN SELATAN	4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
21	KALIMANTAN TIMUR	5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
22	SULAWESI UTARA	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	GORONTALO	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	SULAWESI TENGAH	21	1.9	1.8	1.8	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.9
25	SULAWESI TENGGARA	10	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
26	SULAWESI SELATAN	146	13.3	12.2	12.1	13.6	12.2	11.4	11.2	10.9	11.4	11.7	12.8	13.0
27	SULAWESI BARAT	14	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3
28	NUSA TENGGARA BARAT	29	2.6	2.4	2.4	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.5	2.6
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
30	MALUKU	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
31	PAPUA	1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
32	MALUKU UTARA	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	IRJA BARAT	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	JUMLAH PROPINSI	2,373	216	199	197	221	199	185	183	178	185	190	209	211

Lampiran 3.18. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	46,500	4,232	3,906	3,860	4,325	3,906	3,627	3,581	3,488	3,627	3,720	4,092	4,139
2	SUMATERA UTARA	165,500	15,061	13,902	13,737	15,392	13,902	12,909	12,744	12,413	12,909	13,240	14,564	14,730
3	SUMATERA BARAT	72,500	6,598	6,090	6,018	6,743	6,090	5,655	5,583	5,438	5,655	5,800	6,380	6,453
4	J A M B I	28,600	2,603	2,402	2,374	2,660	2,402	2,231	2,202	2,145	2,231	2,288	2,517	2,545
5	R I A U	23,700	2,157	1,991	1,967	2,204	1,991	1,849	1,825	1,778	1,849	1,896	2,086	2,109
6	BENGKULU	27,900	2,539	2,344	2,316	2,595	2,344	2,176	2,148	2,093	2,176	2,232	2,455	2,483
7	SUMATERA SELATAN	122,900	11,184	10,324	10,201	11,430	10,324	9,586	9,463	9,218	9,586	9,832	10,815	10,938
8	BANGKA BELITUNG	18,800	1,711	1,579	1,560	1,748	1,579	1,466	1,448	1,410	1,466	1,504	1,654	1,673
9	LAMPUNG	161,000	14,651	13,524	13,363	14,973	13,524	12,558	12,397	12,075	12,558	12,880	14,168	14,329
10	KEP. RIAU	1,000	91	84	83	93	84	78	77	75	78	80	88	89
11	DKI. JAKARTA	100	9	8	8	9	8	8	8	8	8	8	9	9
12	BANTEN	37,400	3,403	3,142	3,104	3,478	3,142	2,917	2,880	2,805	2,917	2,992	3,291	3,329
13	JAWA BARAT	393,200	35,781	33,029	32,636	36,568	33,029	30,670	30,276	29,490	30,670	31,456	34,602	34,995
14	D.I. YOGYAKARTA	27,600	2,512	2,318	2,291	2,567	2,318	2,153	2,125	2,070	2,153	2,208	2,429	2,456
15	JAWA TENGAH	413,200	37,601	34,709	34,296	38,428	34,709	32,230	31,816	30,990	32,230	33,056	36,362	36,775
16	JAWA TIMUR	674,800	61,407	56,683	56,008	62,756	56,683	52,634	51,960	50,610	52,634	53,984	59,382	60,057
17	B A L I	33,000	3,003	2,772	2,739	3,069	2,772	2,574	2,541	2,475	2,574	2,640	2,904	2,937
18	KALIMANTAN BARAT	56,900	5,178	4,780	4,723	5,292	4,780	4,438	4,381	4,268	4,438	4,552	5,007	5,064
19	KALIMANTAN TENGAH	23,800	2,166	1,999	1,975	2,213	1,999	1,856	1,833	1,785	1,856	1,904	2,094	2,118
20	KALIMANTAN SELATAN	33,400	3,039	2,806	2,772	3,106	2,806	2,605	2,572	2,505	2,605	2,672	2,939	2,973
21	KALIMANTAN TIMUR	21,900	1,993	1,840	1,818	2,037	1,840	1,708	1,686	1,643	1,708	1,752	1,927	1,949
22	SULAWESI UTARA	15,600	1,420	1,310	1,295	1,451	1,310	1,217	1,201	1,170	1,217	1,248	1,373	1,388
23	GORONTALO	13,900	1,265	1,168	1,154	1,293	1,168	1,084	1,070	1,043	1,084	1,112	1,223	1,237
24	SULAWESI TENGAH	22,800	2,075	1,915	1,892	2,120	1,915	1,778	1,756	1,710	1,778	1,824	2,006	2,029
25	SULAWESI TENGGARA	10,400	946	874	863	967	874	811	801	780	811	832	915	926
26	SULAWESI SELATAN	79,400	7,225	6,670	6,590	7,384	6,670	6,193	6,114	5,955	6,193	6,352	6,987	7,067
27	SULAWESI BARAT	10,700	974	899	888	995	899	835	824	803	835	856	942	952
28	NUSA TENGGARA BARAT	35,900	3,267	3,016	2,980	3 339	3,016	2,800	2,764	2,693	2,800	2,872	3,159	3,195
29	NUSA TENGGARA TIMUR	9,900	901	832	822	921	832	772	762	743	772	792	871	881
30	MALUKU	1,800	164	151	149	167	151	140	139	135	140	144	158	160
31	PAPUA	6,000	546	504	498	558	504	468	462	450	468	480	528	534
32	MALUKU UTARA	1,620	147	136	134	151	136	126	125	122	126	130	143	144
33	IRJA BARAT	2 200	200	185	183	205	185	172	169	165	172	176	194	196
	JUMLAH PROPINSI	2,593,920	236,047	217,889	215,295	241,235	217,889	202,326	199,732	194,544	202,326	207,514	228,265	230,859

Lampiran 3.19. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	29,600	2,694	2,486	2,457	2,753	2,486	2,309	2,279	2,220	2,309	2,368	2,605	2,634
2	SUMATERA UTARA	105,349	9,587	8,849	8,744	9,797	8,849	8,217	8,112	7,901	8,217	8,428	9,271	9,376
3	SUMATERA BARAT	46,150	4,200	3,877	3,830	4,292	3,877	3,600	3,554	3,461	3,600	3,692	4,061	4,107
4	J A M B I	18,205	1,657	1,529	1,511	1,693	1,529	1,420	1,402	1,365	1,420	1,456	1,602	1,620
5	R I A U	15,086	1,373	1,267	1,252	1,403	1,267	1,177	1,162	1,131	1,177	1,207	1,328	1,343
6	BENGKULU	17,760	1,616	1,492	1,474	1,652	1,492	1,385	1,367	1,332	1,385	1,421	1,563	1,581
7	SUMATERA SELATAN	78,232	7,119	6,571	6,493	7,276	6,571	6,102	6,024	5,867	6,102	6,259	6,884	6,963
8	BANGKA BELITUNG	11,967	1,089	1,005	993	1,113	1,005	933	921	898	933	957	1,053	1,065
9	LAMPUNG	102,485	9,326	8,609	8,506	9,531	8,609	7,994	7,891	7,686	7,994	8,199	9,019	9,121
10	KEP. RIAU	637	58	53	53	59	53	50	49	48	50	51	56	57
11	DKI. JAKARTA	64	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6
12	BANTEN	23,807	2,166	2,000	1,976	2,214	2,000	1,857	1,833	1,786	1,857	1,905	2,095	2,119
13	JAWA BARAT	250,291	22,777	21,024	20,774	23,277	21,024	19,523	19,272	18,772	19,523	20,023	22,026	22,276
14	D.I. YOGYAKARTA	17,569	1,599	1,476	1,458	1,634	1,476	1,370	1,353	1,318	1,370	1,406	1,546	1,564
15	JAWA TENGAH	263,022	23,935	22,094	21,831	24,461	22,094	20,516	20,253	19,727	20,516	21,042	23,146	23,409
16	JAWA TIMUR	429,544	39,088	36,082	35,652	39,948	36,082	33,504	33,075	32,216	33,504	34,364	37,800	38,229
17	B A L I	21,006	1,912	1,765	1,744	1,954	1,765	1,638	1,617	1,575	1,638	1,680	1,849	1,870
18	KALIMANTAN BARAT	36,220	3,296	3,042	3,006	3,368	3,042	2,825	2,789	2,716	2,825	2,898	3,187	3,224
19	KALIMANTAN TENGAH	15,150	1,379	1,273	1,257	1,409	1,273	1,182	1,167	1,136	1,182	1,212	1,333	1,348
20	KALIMANTAN SELATAN	21,261	1,935	1,786	1,765	1,977	1,786	1,658	1,637	1,595	1,658	1,701	1,871	1,892
21	KALIMANTAN TIMUR	13,940	1,269	1,171	1,157	1,296	1,171	1,087	1,073	1,046	1,087	1,115	1,227	1,241
22	SULAWESI UTARA	9,930	904	834	824	924	834	775	765	745	775	794	874	884
23	GORONTALO	8,848	805	743	734	823	743	690	681	664	690	708	779	787
24	SULAWESI TENGAH	14,513	1,321	1,219	1,205	1,350	1,219	1,132	1,118	1,089	1,132	1,161	1,277	1,292
25	SULAWESI TENGGARA	6,620	602	556	549	616	556	516	510	497	516	530	583	589
26	SULAWESI SELATAN	50,542	4,599	4,246	4,195	4,700	4,246	3,942	3,892	3,791	3,942	4,043	4,448	4,498
27	SULAWESI BARAT	6,811	620	572	565	633	572	531	524	511	531	545	599	606
28	NUSA TENGGARA BARAT	22,852	2,080	1,920	1,897	2,125	1,920	1,782	1,760	1,714	1,782	1,828	2,011	2,034
29	NUSA TENGGARA TIMUR	6,302	573	529	523	586	529	492	485	473	492	504	555	561
30	MALUKU	1,146	104	96	95	107	96	89	88	86	89	92	101	102
31	PAPUA	3,819	348	321	317	355	321	298	294	286	298	306	336	340
32	MALUKU UTARA	1,031	94	87	86	96	87	80	79	77	80	82	91	92
33	IRJA BARAT	1,400	127	118	116	130	118	109	108	105	109	112	123	125
	JUMLAH PROPINSI	1,651,159	150,255	138,697	137,046	153,558	138,697	128,790	127,139	123,837	128,790	132,093	145,302	146,953

Lampiran 3.20. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	4,172	380	350	346	388	350	325	321	313	325	334	367	371
2	SUMATERA UTARA	14,850	1,351	1,247	1,233	1,381	1,247	1,158	1,143	1,114	1,158	1,188	1,307	1,322
3	SUMATERA BARAT	6,505	592	546	540	605	546	507	501	488	507	520	572	579
4	J A M B I	2,566	234	216	213	239	216	200	198	192	200	205	226	228
5	R I A U	2,127	194	179	177	198	179	166	164	159	166	170	187	189
6	BENGKULU	2,503	228	210	208	233	210	195	193	188	195	200	220	223
7	SUMATERA SELATAN	11,028	1,004	926	915	1,026	926	860	849	827	860	882	970	981
8	BANGKA BELITUNG	1,687	154	142	140	157	142	132	130	127	132	135	148	150
9	LAMPUNG	14,446	1,315	1,213	1,199	1,343	1,213	1,127	1,112	1,083	1,127	1,156	1,271	1,286
10	KEP. RIAU	90	8	8	7	8	8	7	7	7	7	7	8	8
11	DKI. JAKARTA	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	3,356	305	282	279	312	282	262	258	252	262	268	295	299
13	JAWA BARAT	35,281	3,211	2,964	2,928	3,281	2,964	2,752	2,717	2,646	2,752	2,822	3,105	3,140
14	D.I. YOGYAKARTA	2,476	225	208	206	230	208	193	191	186	193	198	218	220
15	JAWA TENGAH	37,076	3,374	3,114	3,077	3,448	3,114	2,892	2,855	2,781	2,892	2,966	3,263	3,300
16	JAWA TIMUR	60,548	5,510	5,086	5,026	5,631	5,086	4,723	4,662	4,541	4,723	4,844	5,328	5,389
17	B A L I	2,961	269	249	246	275	249	231	228	222	231	237	261	264
18	KALIMANTAN BARAT	5,106	465	429	424	475	429	398	393	383	398	408	449	454
19	KALIMANTAN TENGAH	2,136	194	179	177	199	179	167	164	160	167	171	188	190
20	KALIMANTAN SELATAN	2,997	273	252	249	279	252	234	231	225	234	240	264	267
21	KALIMANTAN TIMUR	1,965	179	165	163	183	165	153	151	147	153	157	173	175
22	SULAWESI UTARA	1,400	127	118	116	130	118	109	108	105	109	112	123	125
23	GORONTALO	1,247	113	105	104	116	105	97	96	94	97	100	110	111
24	SULAWESI TENGAH	2,046	186	172	170	190	172	160	158	153	160	164	180	182
25	SULAWESI TENGGARA	933	85	78	77	87	78	73	72	70	73	75	82	83
26	SULAWESI SELATAN	7,124	648	598	591	663	598	556	549	534	556	570	627	634
27	SULAWESI BARAT	960	87	81	80	89	81	75	74	72	75	77	84	85
28	NUSA TENGGARA BARAT	3,221	293	271	267	300	271	251	248	242	251	258	283	287
29	NUSA TENGGARA TIMUR	888	81	75	74	83	75	69	68	67	69	71	78	79
30	MALUKU	162	15	14	13	15	14	13	12	12	13	13	14	14
31	PAPUA	536	49	45	45	50	45	42	41	40	42	43	47	48
32	MALUKU UTARA	145	13	12	12	14	12	11	11	11	11	12	13	13
33	IRJA BARAT	197	18	17	16	18	17	15	15	15	15	16	17	18
	JUMLAH PROPINSI	232,747	21,180	19,551	19,318	21,645	19,551	18,154	17,922	17,456	18,154	18,620	20,482	20,714

Lampiran 3.21. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	12,728	1,158	1,069	1,056	1,184	1,069	993	980	955	993	1,018	1,120	1,133
2	SUMATERA UTARA	45,301	4,122	3,805	3,760	4,213	3,805	3,533	3,488	3,398	3,533	3,624	3,986	4,032
3	SUMATERA BARAT	19,845	1,806	1,667	1,647	1,846	1,667	1,548	1,528	1,488	1,548	1,588	1,746	1,766
4	J A M B I	7,828	712	658	650	728	658	611	603	587	611	626	689	697
5	R I A U	6,487	590	545	538	603	545	506	500	487	506	519	571	577
6	BENGKULU	7,637	695	641	634	710	641	596	588	573	596	611	672	680
7	SUMATERA SELATAN	33,640	3,061	2,826	2,792	3,129	2,826	2,624	2,590	2,523	2,624	2,691	2,960	2,994
8	BANGKA BELITUNG	5,146	468	432	427	479	432	401	396	386	401	412	453	458
9	LAMPUNG	44,069	4,010	3,702	3,658	4,098	3,702	3,437	3,393	3,305	3,437	3,526	3,878	3,922
10	KEP. RIAU	274	25	23	23	25	23	21	21	21	21	22	24	24
11	DKI. JAKARTA	27	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
12	BANTEN	10,237	932	860	850	952	860	799	788	768	799	819	901	911
13	JAWA BARAT	107,628	9,794	9,041	8,933	10,009	9,041	8,395	8,287	8,072	8,395	8,610	9,471	9,579
14	D.I. YOGYAKARTA	7,555	687	635	627	703	635	589	582	567	589	604	665	672
15	JAWA TENGAH	113,102	10,292	9,501	9,387	10,518	9,501	8,822	8,709	8,483	8,822	9,048	9,953	10,066
16	JAWA TIMUR	184,708	16,808	15,515	15,331	17,178	15,515	14,407	14,223	13,853	14,407	14,777	16,254	16,439
17	B A L I	9,033	822	759	750	840	759	705	696	677	705	723	795	804
18	KALIMANTAN BARAT	15,575	1,417	1,308	1,293	1,448	1,308	1,215	1,199	1,168	1,215	1,246	1,371	1,386
19	KALIMANTAN TENGAH	6,515	593	547	541	606	547	508	502	489	508	521	573	580
20	KALIMANTAN SELATAN	9,142	832	768	759	850	768	713	704	686	713	731	805	814
21	KALIMANTAN TIMUR	5,995	546	504	498	557	504	468	462	450	468	480	528	534
22	SULAWESI UTARA	4,270	389	359	354	397	359	333	329	320	333	342	376	380
23	GORONTALO	3,805	346	320	316	354	320	297	293	285	297	304	335	339
24	SULAWESI TENGAH	6,241	568	524	518	580	524	487	481	466	487	499	549	555
25	SULAWESI TENGGARA	2,847	259	239	236	265	239	222	219	214	222	228	251	253
26	SULAWESI SELATAN	21,734	1,978	1,826	1,804	2,021	1,826	1,695	1,673	1,630	1,695	1,739	1,913	1,934
27	SULAWESI BARAT	2,929	267	246	243	272	246	228	226	220	228	234	258	261
28	NUSA TENGGARA BARAT	9,827	894	825	816	914	825	766	757	737	766	786	865	875
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2,710	247	228	225	252	228	211	209	203	211	217	238	241
30	MALUKU	493	45	41	41	46	41	38	38	37	38	39	43	44
31	PAPUA	1,642	149	138	136	153	138	128	126	123	128	131	145	146
32	MALUKU UTARA	443	40	37	37	41	37	35	34	33	35	35	39	39
33	IRJA BARAT	602	55	51	50	56	51	47	46	45	47	48	53	54
	JUMLAH PROPINSI	710,014	64,611	59,641	58,931	66,031	59,641	55,381	54,671	53,251	55,381	56,801	62,481	63,191

Lampiran 3.22. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	13,600	1,238	1,142	1,129	1,265	1,142	1,061	1,047	1,020	1,061	1,088	1,197	1,210
2	SUMATERA UTARA	46,800	4,259	3,931	3,884	4,352	3,931	3,650	3,604	3,510	3,650	3,744	4,118	4,165
3	SUMATERA BARAT	24,000	2,184	2,016	1,992	2,232	2,016	1,872	1,848	1,800	1,872	1,920	2,112	2,136
4	J A M B I	9,600	874	806	797	893	806	749	739	720	749	768	845	854
5	R I A U	5,100	464	428	423	474	428	398	393	383	398	408	449	454
6	BENGKULU	10,200	928	857	847	949	857	796	785	765	796	816	898	908
7	SUMATERA SELATAN	22,800	2,075	1,915	1,892	2,120	1,915	1,778	1,756	1,710	1,778	1,824	2,006	2,029
8	BANGKA BELITUNG	5,700	519	479	473	530	479	445	439	428	445	456	502	507
9	LAMPUNG	38,000	3,458	3,192	3,154	3,534	3,192	2,964	2,926	2,850	2,964	3,040	3,344	3,382
10	KEP. RIAU	150	14	13	12	14	13	12	12	11	12	12	13	13
11	DKI. JAKARTA	50	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
12	BANTEN	4,800	437	403	398	446	403	374	370	360	374	384	422	427
13	JAWA BARAT	49,300	4,486	4,141	4,092	4,585	4,141	3,845	3,796	3,698	3,845	3,944	4,338	4,388
14	D.I. YOGYAKARTA	10,500	956	882	872	977	882	819	809	788	819	840	924	935
15	JAWA TENGAH	162,100	14,751	13,616	13,454	15,075	13,616	12,644	12,482	12,158	12,644	12,968	14,265	14,427
16	JAWA TIMUR	336,200	30,594	28,241	27,905	31,267	28,241	26,224	25,887	25,215	26,224	26,896	29,586	29,922
17	B A L I	23,800	2,166	1,999	1,975	2,213	1,999	1,856	1,833	1,785	1,856	1,904	2,094	2,118
18	KALIMANTAN BARAT	11,500	1,047	966	955	1,070	966	897	886	863	897	920	1,012	1,024
19	KALIMANTAN TENGAH	3,800	346	319	315	353	319	296	293	285	296	304	334	338
20	KALIMANTAN SELATAN	6,300	573	529	523	586	529	491	485	473	491	504	554	561
21	KALIMANTAN TIMUR	3,500	319	294	291	326	294	273	270	263	273	280	308	312
22	SULAWESI UTARA	2,800	255	235	232	260	235	218	216	210	218	224	246	249
23	GORONTALO	750	68	63	62	70	63	59	58	56	59	60	66	67
24	SULAWESI TENGAH	3,200	291	269	266	298	269	250	246	240	250	256	282	285
25	SULAWESI TENGGARA	6,300	573	529	523	586	529	491	485	473	491	504	554	561
26	SULAWESI SELATAN	21,000	1,911	1,764	1,743	1,953	1,764	1,638	1,617	1,575	1,638	1,680	1,848	1,869
27	SULAWESI BARAT	1,200	109	101	100	112	101	94	92	90	94	96	106	107
28	NUSA TENGGARA BAR	7,800	710	655	647	725	655	608	601	585	608	624	686	694
29	NUSA TENGGARA TIMU	1,300	118	109	108	121	109	101	100	98	101	104	114	116
30	MALUKU	400	36	34	33	37	34	31	31	30	31	32	35	36
31	PAPUA	1,750	159	147	145	163	147	137	135	131	137	140	154	156
32	MALUKU UTARA	500	46	42	42	47	42	39	39	38	39	40	44	45
33	IRJA BARAT	200	18	17	17	19	17	16	15	15	16	16	18	18
	JUMLAH PROPINSI	835,000	75,985	70,140	69,305	77,655	70,140	65,130	64,295	62,625	65,130	66,800	73,480	74,315

Lampiran 3.23 Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	8,840	804	743	734	822	743	690	681	663	690	707	778	787
2	SUMATERA UTARA	30,420	2,768	2,555	2,525	2,829	2,555	2,373	2,342	2,282	2,373	2,434	2,677	2,707
3	SUMATERA BARAT	15,600	1,420	1,310	1,295	1,451	1,310	1,217	1,201	1,170	1,217	1,248	1,373	1,388
4	J A M B I	6,240	568	524	518	580	524	487	480	468	487	499	549	555
5	R I A U	3,315	302	278	275	308	278	259	255	249	259	265	292	295
6	BENGKULU	6,630	603	557	550	617	557	517	511	497	517	530	583	590
7	SUMATERA SELATAN	14,820	1,349	1,245	1,230	1,378	1,245	1,156	1,141	1,112	1,156	1,186	1,304	1,319
8	BANGKA BELITUNG	3,705	337	311	308	345	311	289	285	278	289	296	326	330
9	LAMPUNG	24,700	2,248	2,075	2,050	2,297	2,075	1,927	1,902	1,853	1,927	1,976	2,174	2,198
10	KEP. RIAU	98	9	8	8	9	8	8	8	7	8	8	9	9
11	DKI. JAKARTA	33	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
12	BANTEN	3,120	284	262	259	290	262	243	240	234	243	250	275	278
13	JAWA BARAT	32,045	2,916	2,692	2,660	2,980	2,692	2,500	2,467	2,403	2,500	2,564	2,820	2,852
14	D.I. YOGYAKARTA	6,825	621	573	566	635	573	532	526	512	532	546	601	607
15	JAWA TENGAH	105,365	9,588	8,851	8,745	9,799	8,851	8,218	8,113	7,902	8,218	8,429	9,272	9,377
16	JAWA TIMUR	218,530	19,886	18,357	18,138	20,323	18,357	17,045	16,827	16,390	17,045	17,482	19,231	19,449
17	B A L I	15,470	1,408	1,299	1,284	1,439	1,299	1,207	1,191	1,160	1,207	1,238	1,361	1,377
18	KALIMANTAN BARAT	7,475	680	628	620	695	628	583	576	561	583	598	658	665
19	KALIMANTAN TENGAH	2,470	225	207	205	230	207	193	190	185	193	198	217	220
20	KALIMANTAN SELATAN	4,095	373	344	340	381	344	319	315	307	319	328	360	364
21	KALIMANTAN TIMUR	2,275	207	191	189	212	191	177	175	171	177	182	200	202
22	SULAWESI UTARA	1,820	166	153	151	169	153	142	140	137	142	146	160	162
23	GORONTALO	488	44	41	40	45	41	38	38	37	38	39	43	43
24	SULAWESI TENGAH	2,080	189	175	173	193	175	162	160	156	162	166	183	185
25	SULAWESI TENGGARA	4,095	373	344	340	381	344	319	315	307	319	328	360	364
26	SULAWESI SELATAN	13,650	1,242	1,147	1,133	1,269	1,147	1,065	1,051	1,024	1,065	1,092	1,201	1,215
27	SULAWESI BARAT	780	71	66	65	73	66	61	60	59	61	62	69	69
28	NUSA TENGGARA BAR	5,070	461	426	421	472	426	395	390	380	395	406	446	451
29	NUSA TENGGARA TIMU	845	77	71	70	79	71	66	65	63	66	68	74	75
30	MALUKU	260	24	22	22	24	22	20	20	20	20	21	23	23
31	PAPUA	1,138	104	96	94	106	96	89	88	85	89	91	100	101
32	MALUKU UTARA	325	30	27	27	30	27	25	25	24	25	26	29	29
33	IRJA BARAT	130	12	11	11	12	11	10	10	10	10	10	11	12
	JUMLAH PROPINSI	542,750	49,390	45,591	45,048	50,476	45,591	42,335	41,792	40,706	42,335	43,420	47,762	48,305

Lampiran 3.24 Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Hortikultura (Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	1,253	114	105	104	117	105	98	97	94	98	100	110	112
2	SUMATERA UTARA	4,314	393	362	358	401	362	336	332	324	336	345	380	384
3	SUMATERA BARAT	2,212	201	186	184	206	186	173	170	166	173	177	195	197
4	J A M B I	885	81	74	73	82	74	69	68	66	69	71	78	79
5	R I A U	470	43	39	39	44	39	37	36	35	37	38	41	42
6	BENGKULU	940	86	79	78	87	79	73	72	71	73	75	83	84
7	SUMATERA SELATAN	2,101	191	177	174	195	177	164	162	158	164	168	185	187
8	BANGKA BELITUNG	525	48	44	44	49	44	41	40	39	41	42	46	47
9	LAMPUNG	3,502	319	294	291	326	294	273	270	263	273	280	308	312
10	KEP. RIAU	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	442	40	37	37	41	37	35	34	33	35	35	39	39
13	JAWA BARAT	4,544	413	382	377	423	382	354	350	341	354	364	400	404
14	D.I. YOGYAKARTA	968	88	81	80	90	81	75	75	73	75	77	85	86
15	JAWA TENGAH	14,941	1,360	1,255	1,240	1,389	1,255	1,165	1,150	1,121	1,165	1,195	1,315	1,330
16	JAWA TIMUR	30,987	2,820	2,603	2,572	2,882	2,603	2,417	2,386	2,324	2,417	2,479	2,727	2,758
17	B A L I	2,194	200	184	182	204	184	171	169	165	171	175	193	195
18	KALIMANTAN BARAT	1,060	96	89	88	99	89	83	82	79	83	85	93	94
19	KALIMANTAN TENGAH	350	32	29	29	33	29	27	27	26	27	28	31	31
20	KALIMANTAN SELATAN	581	53	49	48	54	49	45	45	44	45	46	51	52
21	KALIMANTAN TIMUR	323	29	27	27	30	27	25	25	24	25	26	28	29
22	SULAWESI UTARA	258	23	22	21	24	22	20	20	19	20	21	23	23
23	GORONTALO	69	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6
24	SULAWESI TENGAH	295	27	25	24	27	25	23	23	22	23	24	26	26
25	SULAWESI TENGGARA	581	53	49	48	54	49	45	45	44	45	46	51	52
26	SULAWESI SELATAN	1,936	176	163	161	180	163	151	149	145	151	155	170	172
27	SULAWESI BARAT	111	10	9	9	10	9	9	9	8	9	9	10	10
28	NUSA TENGGARA BAR	719	65	60	60	67	60	56	55	54	56	58	63	64
29	NUSA TENGGARA TIMU	120	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	11	11
30	MALUKU	37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
31	PAPUA	161	15	14	13	15	14	13	12	12	13	13	14	14
32	MALUKU UTARA	46	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
33	IRJA BARAT	18	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
	JUMLAH PROPINSI	76,961	7,003	6,465	6,388	7,157	6,465	6,003	5,926	5,772	6,003	6,157	6,773	6,850

Lampiran 3.25 Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Perkebunan (Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	3,001	273	252	249	279	252	234	231	225	234	240	264	267
2	SUMATERA UTARA	10,326	940	867	857	960	867	805	795	774	805	826	909	919
3	SUMATERA BARAT	5,295	482	445	440	492	445	413	408	397	413	424	466	471
4	J A M B I	2,118	193	178	176	197	178	165	163	159	165	169	186	189
5	R I A U	1,125	102	95	93	105	95	88	87	84	88	90	99	100
6	BENGKULU	2,251	205	189	187	209	189	176	173	169	176	180	198	200
7	SUMATERA SELATAN	5,031	458	423	418	468	423	392	387	377	392	402	443	448
8	BANGKA BELITUNG	1,258	114	106	104	117	106	98	97	94	98	101	111	112
9	LAMPUNG	8,384	763	704	696	780	704	654	646	629	654	671	738	746
10	KEP. RIAU	33	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
11	DKI. JAKARTA	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	1,059	96	89	88	98	89	83	82	79	83	85	93	94
13	JAWA BARAT	10,877	990	914	903	1,012	914	848	838	816	848	870	957	968
14	D.I. YOGYAKARTA	2,317	211	195	192	215	195	181	178	174	181	185	204	206
15	JAWA TENGAH	35,765	3,255	3,004	2,969	3,326	3,004	2,790	2,754	2,682	2,790	2,861	3,147	3,183
16	JAWA TIMUR	74,179	6,750	6,231	6,157	6,899	6,231	5,786	5,712	5,563	5,786	5,934	6,528	6,602
17	B A L I	5,251	478	441	436	488	441	410	404	394	410	420	462	467
18	KALIMANTAN BARAT	2,537	231	213	211	236	213	198	195	190	198	203	223	226
19	KALIMANTAN TENGAH	838	76	70	70	78	70	65	65	63	65	67	74	75
20	KALIMANTAN SELATAN	1,390	126	117	115	129	117	108	107	104	108	111	122	124
21	KALIMANTAN TIMUR	772	70	65	64	72	65	60	59	58	60	62	68	69
22	SULAWESI UTARA	618	56	52	51	57	52	48	48	46	48	49	54	55
23	GORONTALO	165	15	14	14	15	14	13	13	12	13	13	15	15
24	SULAWESI TENGAH	706	64	59	59	66	59	55	54	53	55	56	62	63
25	SULAWESI TENGGARA	1,390	126	117	115	129	117	108	107	104	108	111	122	124
26	SULAWESI SELATAN	4,633	422	389	385	431	389	361	357	348	361	371	408	412
27	SULAWESI BARAT	265	24	22	22	25	22	21	20	20	21	21	23	24
28	NUSA TENGGARA BAR	1,721	157	145	143	160	145	134	133	129	134	138	151	153
29	NUSA TENGGARA TIMU	287	26	24	24	27	24	22	22	22	22	23	25	26
30	MALUKU	88	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	8
31	PAPUA	386	35	32	32	36	32	30	30	29	30	31	34	34
32	MALUKU UTARA	110	10	9	9	10	9	9	8	8	9	9	10	10
33	IRJA BARAT	44	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4
	JUMLAH PROPINSI	184,233	16,765	15,476	15,291	17,134	15,476	14,370	14,186	13,817	14,370	14,739	16,213	16,397

Lampiran 3.26. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Peternakan (Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	40	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
2	SUMATERA UTARA	138	13	12	11	13	12	11	11	10	11	11	12	12
3	SUMATERA BARAT	71	6	6	6	7	6	6	5	5	6	6	6	6
4	J A M B I	28	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3
5	R I A U	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	BENGKULU	30	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
7	SUMATERA SELATAN	67	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	6	6
8	BANGKA BELITUNG	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
9	LAMPUNG	112	10	9	9	10	9	9	9	8	9	9	10	10
10	KEP. RIAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	JAWA BARAT	146	13	12	12	14	12	11	11	11	11	12	13	13
14	D.I. YOGYAKARTA	31	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
15	JAWA TENGAH	479	44	40	40	45	40	37	37	36	37	38	42	43
16	JAWA TIMUR	993	90	83	82	92	83	77	76	74	77	79	87	88
17	B A L I	70	6	6	6	7	6	5	5	5	5	6	6	6
18	KALIMANTAN BARAT	34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	KALIMANTAN TENGAH	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	KALIMANTAN SELATAN	19	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
21	KALIMANTAN TIMUR	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	SULAWESI UTARA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	GORONTALO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	SULAWESI TENGAH	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	SULAWESI TENGGARA	19	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
26	SULAWESI SELATAN	62	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	6
27	SULAWESI BARAT	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NUSA TENGGARA BAR	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
29	NUSA TENGGARA TIMU	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	MALUKU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MALUKU UTARA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PROPINSI	2,466	224	207	205	229	207	192	190	185	192	197	217	219

Lampiran 3.27. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	466	42	39	39	43	39	36	36	35	36	37	41	41
2	SUMATERA UTARA	1,602	146	135	133	149	135	125	123	120	125	128	141	143
3	SUMATERA BARAT	822	75	69	68	76	69	64	63	62	64	66	72	73
4	J A M B I	329	30	28	27	31	28	26	25	25	26	26	29	29
5	R I A U	175	16	15	14	16	15	14	13	13	14	14	15	16
6	BENGKULU	349	32	29	29	32	29	27	27	26	27	28	31	31
7	SUMATERA SELATAN	781	71	66	65	73	66	61	60	59	61	62	69	69
8	BANGKA BELITUNG	195	18	16	16	18	16	15	15	15	15	16	17	17
9	LAMPUNG	1,301	118	109	108	121	109	101	100	98	101	104	114	116
10	KEP. RIAU	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	164	15	14	14	15	14	13	13	12	13	13	14	15
13	JAWA BARAT	1,688	154	142	140	157	142	132	130	127	132	135	149	150
14	D.I. YOGYAKARTA	360	33	30	30	33	30	28	28	27	28	29	32	32
15	JAWA TENGAH	5,550	505	466	461	516	466	433	427	416	433	444	488	494
16	JAWA TIMUR	11,511	1,048	967	955	1,071	967	898	886	863	898	921	1,013	1,025
17	B A L I	815	74	68	68	76	68	64	63	61	64	65	72	73
18	KALIMANTAN BARAT	394	36	33	33	37	33	31	30	30	31	32	35	35
19	KALIMANTAN TENGAH	130	12	11	11	12	11	10	10	10	10	10	11	12
20	KALIMANTAN SELATAN	216	20	18	18	20	18	17	17	16	17	17	19	19
21	KALIMANTAN TIMUR	120	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	11	11
22	SULAWESI UTARA	96	9	8	8	9	8	7	7	7	7	8	8	9
23	GORONTALO	26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	SULAWESI TENGAH	110	10	9	9	10	9	9	8	8	9	9	10	10
25	SULAWESI TENGGARA	216	20	18	18	20	18	17	17	16	17	17	19	19
26	SULAWESI SELATAN	719	65	60	60	67	60	56	55	54	56	58	63	64
27	SULAWESI BARAT	41	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4
28	NUSA TENGGARA BAR	267	24	22	22	25	22	21	21	20	21	21	24	24
29	NUSA TENGGARA TIMU	45	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4
30	MALUKU	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	60	5	5	5	6	5	5	5	4	5	5	5	5
32	MALUKU UTARA	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
33	IRJA BARAT	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH PROPINSI	28,590	2,602	2,402	2,373	2,659	2,402	2,230	2,201	2,144	2,230	2,287	2,516	2,545

Subsidi

Jenis Pupuk : ZA (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	425,529	38,723	35,744	35,319	39,574	35,744	33,191	32,766	31,915	33,191	34,042	37,447	37,872
Hortikultura	173,536	15,792	14,577	14,404	16,139	14,577	13,536	13,362	13,015	13,536	13,883	15,271	15,445
Perkebunan	398,561	36,269	33,479	33,081	37,066	33,479	31,088	30,689	29,892	31,088	31,885	35,073	35,472
Peternakan	2,373	216	199	197	221	199	185	183	178	185	190	209	211
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	**1,000,000**	**91,000**	**84,000**	**83,000**	**93,000**	**84,000**	**78,000**	**77,000**	**75,000**	**78,000**	**80,000**	**88,000**	**89,000**

Subsidi

Jenis Pupuk : NPK (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	1,651,159	150,255	138,697	137,046	153,558	138,697	128,790	127,139	123,837	128,790	132,093	145,302	146,953
Hortikultura	232,747	21,180	19,551	19,318	21,645	19,551	18,154	17,922	17,456	18,154	18,620	20,482	20,714
Perkebunan	710,014	64,611	59,641	58,931	66,031	59,641	55,381	54,671	53,251	55,381	56,801	62,481	63,191
Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	**2,593,920**	**236,047**	**217,889**	**215,295**	**241,235**	**217,889**	**202,326**	**199,732**	**194,544**	**202,326**	**207,514**	**228,265**	**230,859**

Subsidi

Jenis Pupuk : ORGANIK (Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	542,750	49,390	45,591	45,048	50,476	45,591	42,335	41,792	40,706	42,335	43,420	47,762	48,305
Hortikultura	76,961	7,003	6,465	6,388	7,157	6,465	6,003	5,926	5,772	6,003	6,157	6,773	6,850
Perkebunan	184,233	16,765	15,476	15,291	17,134	15,476	14,370	14,186	13,817	14,370	14,739	16,213	16,397
Peternakan	2,466	224	207	205	229	207	192	190	185	192	197	217	219
Perikanan Budidaya	28,590	2,602	2,402	2,373	2,659	2,402	2,230	2,201	2,144	2,230	2,287	2,516	2,545
JUMLAH	**835,000**	**75,985**	**70,140**	**69,305**	**77,655**	**70,140**	**65,130**	**64,295**	**62,625**	**65,130**	**66,800**	**73,480**	**74,315**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011
Tanggal : 9 Desember 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012
MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	3,315,000	576,708	425,529	1,651,159	542,750
Hortikultura	470,061	48,967	173,536	232,747	76,961
Perkebunan	1,125,255	301,156	398,561	710,014	184,233
Peternakan	15,061	1,349	2,373	-	2,466
Perikanan Budidaya	174,622	71,819	-	-	28,590
JUMLAH	**5,100,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**2,593,920**	**835,000**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran 2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011
Tanggal : 9 Desember 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	N A D	94,800	23,900	8,800	46,500	13,600
2	SUMATERA UTARA	207,600	60,800	53,000	165,500	46,800
3	SUMATERA BARAT	82,300	30,900	21,000	72,500	24,000
4	J A M B I	46,500	14,400	4,600	28,600	9,600
5	R I A U	39,000	10,300	5,200	23,700	5,100
6	BENGKULU	30,000	9,900	3,600	27,900	10,200
7	SUMATERA SELATAN	228,700	47,200	7,700	122,900	22,800
8	BANGKA BELITUNG	20,000	3,900	1,800	18,800	5,700
9	LAMPUNG	361,500	56,700	17,500	161,000	38,000
10	KEP. RIAU	200	160	100	1,000	150
11	DKI. JAKARTA	300	90	10	100	50
12	BANTEN	72,800	23,400	1,800	37,400	4,800
13	JAWA BARAT	827,900	184,900	77,700	393,200	49,300
14	D.I. YOGYAKARTA	58,900	7,400	12,200	27,600	10,500
15	JAWA TENGAH	970,000	175,100	186,700	413,200	162,100
16	JAWA TIMUR	1,269,600	215,000	485,000	674,800	336,200
17	B A L I	59,500	5,000	9,800	33,000	23,800
18	KALIMANTAN BARAT	41,000	13,000	3,800	56,900	11,500
19	KALIMANTAN TENGAH	16,900	5,000	700	23,800	3,800
20	KALIMANTAN SELATAN	46,900	10,000	1,700	33,400	6,300
21	KALIMANTAN TIMUR	21,900	7,000	2,200	21,900	3,500
22	SULAWESI UTARA	25,000	5,500	200	15,600	2,800
23	GORONTALO	17,700	1,700	150	13,900	750
24	SULAWESI TENGAH	40,600	5,400	9,000	22,800	3,200
25	SULAWESI TENGGARA	32,300	7,200	4,300	10,400	6,300
26	SULAWESI SELATAN	294,600	44,000	61,400	79,400	21,000
27	SULAWESI BARAT	17,300	3,000	6,100	10,700	1,200
28	NUSA TENGGARA BARAT	122,700	19,600	12,150	35,900	7,800
29	NUSA TENGGARA TIMUR	39,900	5,800	700	9,900	1,300
30	MALUKU	5,500	350	250	1,800	400
31	PAPUA	5,000	2,800	500	6,000	1,750
32	MALUKU UTARA	1,600	200	90	1,620	500
33	IRJA BARAT	1,500	400	250	2,200	200
JUMLAH		**5,100,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**2,593,920**	**835,000**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran 3. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011
Tanggal : 9 Desember 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2012 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	5,100,000	464,100	428,400	423,300	474,300	428,400	397,800	392,700	382,500	397,800	408,000	448,800	453,900
SP-36	1,000,000	91,000	84,000	83,000	93,000	84,000	78,000	77,000	75,000	78,000	80,000	88,000	89,000
ZA	1,000,000	91,000	84,000	83,000	93,000	84,000	78,000	77,000	75,000	78,000	80,000	88,000	89,000
NPK	2,593,920	236,047	217,889	215,295	241,235	217,889	202,326	199,732	194,544	202,326	207,514	228,265	230,859
ORGANIK	835,000	75,985	70,140	69,305	77,655	70,140	65,130	64,295	62,625	65,130	66,800	73,480	74,315
JUMLAH PUPUK	10,528,920	958,132	884,429	873,900	979,190	884,429	821,256	810,727	789,669	821,256	842,314	926,545	937,074

Subsidi

Jenis Pupuk : UREA

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	3,315,000	301,665	278,460	275,145	308,295	278,460	258,570	255,255	248,625	258,570	265,200	291,720	295,035
Hortikultura	470,061	42,776	39,485	39,015	43,716	39,485	36,665	36,195	35,255	36,665	37,605	41,365	41,835
Perkebunan	1,125,255	102,398	94,521	93,396	104,649	94,521	87,770	86,645	84,394	87,770	90,020	99,022	100,148
Peternakan	15,061	1,371	1,265	1,250	1,401	1,265	1,175	1,160	1,130	1,175	1,205	1,325	1,340
Perikanan Budidaya	174,622	15,891	14,668	14,494	16,240	14,668	13,621	13,446	13,097	13,621	13,970	15,367	15,541
JUMLAH	5,100,000	464,100	428,400	423,300	474,300	428,400	397,800	392,700	382,500	397,800	408,000	448,800	453,900

Subsidi

Jenis Pupuk : SP-36

(Ton)

SUB SEKTOR	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
Tanaman Pangan	576,708	52,480	48,444	47,867	53,634	48,444	44,983	44,407	43,253	44,983	46,137	50,750	51,327
Hortikultura	48,967	4,456	4,113	4,064	4,554	4,113	3,819	3,770	3,672	3,819	3,917	4,309	4,358
Perkebunan	301,156	27,405	25,297	24,996	28,008	25,297	23,490	23,189	22,587	23,490	24,093	26,502	26,803
Peternakan	1,349	123	113	112	125	113	105	104	101	105	108	119	120
Perikanan Budidaya	71,819	6,536	6,033	5,961	6,679	6,033	5,602	5,530	5,386	5,602	5,746	6,320	6,392
JUMLAH	1,000,000	91,000	84,000	83,000	93,000	84,000	78,000	77,000	75,000	78,000	80,000	88,000	89,000

Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	94,800	8,627	7,963	7,868	8,816	7,963	7,394	7,300	7,110	7,394	7,584	8,342	8,437
2	SUMATERA UTARA	207,600	18,892	17,438	17,231	19,307	17,438	16,193	15,985	15,570	16,193	16,608	18,269	18,476
3	SUMATERA BARAT	82,300	7,489	6,913	6,831	7,654	6,913	6,419	6,337	6,173	6,419	6,584	7,242	7,325
4	J A M B I	46,500	4,232	3,906	3,860	4,325	3,906	3,627	3,581	3,488	3,627	3,720	4,092	4,139
5	R I A U	39,000	3,549	3,276	3,237	3,627	3,276	3,042	3,003	2,925	3,042	3,120	3,432	3,471
6	BENGKULU	30,000	2,730	2,520	2,490	2,790	2,520	2,340	2,310	2,250	2,340	2,400	2,640	2,670
7	SUMATERA SELATAN	228,700	20,812	19,211	18,982	21,269	19,211	17,839	17,610	17,153	17,839	18,296	20,126	20,354
8	BANGKA BELITUNG	20,000	1,820	1,680	1,660	1,860	1,680	1,560	1,540	1,500	1,560	1,600	1,760	1,780
9	LAMPUNG	361,500	32,897	30,366	30,005	33,620	30,366	28,197	27,836	27,113	28,197	28,920	31,812	32,174
10	KEP. RIAU	200	18	17	17	19	17	16	15	15	16	16	18	18
11	DKI. JAKARTA	300	27	25	25	28	25	23	23	23	23	24	26	27
12	BANTEN	72,800	6,625	6,115	6,042	6,770	6,115	5,678	5,606	5,460	5,678	5,824	6,406	6,479
13	JAWA BARAT	827,900	75,339	69,544	68,716	76,995	69,544	64,576	63,748	62,093	64,576	66,232	72,855	73,683
14	D.I. YOGYAKARTA	58,900	5,360	4,948	4,889	5,478	4,948	4,594	4,535	4,418	4,594	4,712	5,183	5,242
15	JAWA TENGAH	970,000	88,270	81,480	80,510	90,210	81,480	75,660	74,690	72,750	75,660	77,600	85,360	86,330
16	JAWA TIMUR	1,269,600	115,534	106,646	105,377	118,073	106,646	99,029	97,759	95,220	99,029	101,568	111,725	112,994
17	B A L I	59,500	5,415	4,998	4,939	5,534	4,998	4,641	4,582	4,463	4,641	4,760	5,236	5,296
18	KALIMANTAN BARAT	41,000	3,731	3,444	3,403	3,813	3,444	3,198	3,157	3,075	3,198	3,280	3,608	3,649
19	KALIMANTAN TENGAH	16,900	1,538	1,420	1,403	1,572	1,420	1,318	1,301	1,268	1,318	1,352	1,487	1,504
20	KALIMANTAN SELATAN	46,900	4,268	3,940	3,893	4,362	3,940	3,658	3,611	3,518	3,658	3,752	4,127	4,174
21	KALIMANTAN TIMUR	21,900	1,993	1,840	1,818	2,037	1,840	1,708	1,686	1,643	1,708	1,752	1,927	1,949
22	SULAWESI UTARA	25,000	2,275	2,100	2,075	2,325	2,100	1,950	1,925	1,875	1,950	2,000	2,200	2,225
23	GORONTALO	17,700	1,611	1,487	1,469	1,646	1,487	1,381	1,363	1,328	1,381	1,416	1,558	1,575
24	SULAWESI TENGAH	40,600	3,695	3,410	3,370	3,776	3,410	3,167	3,126	3,045	3,167	3,248	3,573	3,613
25	SULAWESI TENGGARA	32,300	2,939	2,713	2,681	3,004	2,713	2,519	2,487	2,423	2,519	2,584	2,842	2,875
26	SULAWESI SELATAN	294,600	26,809	24,746	24,452	27,398	24,746	22,979	22,684	22,095	22,979	23,568	25,925	26,219
27	SULAWESI BARAT	17,300	1,574	1,453	1,436	1,609	1,453	1,349	1,332	1,298	1,349	1,384	1,522	1,540
28	NUSA TENGGARA BARAT	122,700	11,166	10,307	10,184	11,411	10,307	9,571	9,448	9,203	9,571	9,816	10,798	10,920
29	NUSA TENGGARA TIMUR	39,900	3,631	3,352	3,312	3,711	3,352	3,112	3,072	2,993	3,112	3,192	3,511	3,551
30	MALUKU	5,500	501	462	457	512	462	429	424	413	429	440	484	490
31	PAPUA	5,000	455	420	415	465	420	390	385	375	390	400	440	445
32	MALUKU UTARA	1,600	146	134	133	149	134	125	123	120	125	128	141	142
33	IRJA BARAT	1,500	137	126	125	140	126	117	116	113	117	120	132	134
	JUMLAH PROPINSI	5,100,000	464,100	428,400	423,300	474,300	428,400	397,800	392,700	382,500	397,800	408,000	448,800	453,900

Lampiran 3.2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan (Ton)

No.	Propinsi	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	61,620	5,607	5,176	5,114	5,731	5,176	4,806	4,745	4,622	4,806	4,930	5,423	5,484
2	SUMATERA UTARA	134,940	12,280	11,335	11,200	12,549	11,335	10,525	10,390	10,121	10,525	10,795	11,875	12,010
3	SUMATERA BARAT	53,495	4,868	4,494	4,440	4,975	4,494	4,173	4,119	4,012	4,173	4,280	4,708	4,761
4	J A M B I	30,225	2,750	2,539	2,509	2,811	2,539	2,358	2,327	2,267	2,358	2,418	2,660	2,690
5	R I A U	25,350	2,307	2,129	2,104	2,358	2,129	1,977	1,952	1,901	1,977	2,028	2,231	2,256
6	BENGKULU	19,500	1,775	1,638	1,619	1,814	1,638	1,521	1,502	1,463	1,521	1,560	1,716	1,736
7	SUMATERA SELATAN	148,655	13,528	12,487	12,338	13,825	12,487	11,595	11,446	11,149	11,595	11,892	13,082	13,230
8	BANGKA BELITUNG	13,000	1,183	1,092	1,079	1,209	1,092	1,014	1,001	975	1,014	1,040	1,144	1,157
9	LAMPUNG	234,975	21,383	19,738	19,503	21,853	19,738	18,328	18,093	17,623	18,328	18,798	20,678	20,913
10	KEP. RIAU	130	12	11	11	12	11	10	10	10	10	10	11	12
11	DKI. JAKARTA	195	18	16	16	18	16	15	15	15	15	16	17	17
12	BANTEN	47,320	4,306	3,975	3,928	4,401	3,975	3,691	3,644	3,549	3,691	3,786	4,164	4,211
13	JAWA BARAT	538,135	48,970	45,203	44,665	50,047	45,203	41,975	41,436	40,360	41,975	43,051	47,356	47,894
14	D.I. YOGYAKARTA	38,285	3,484	3,216	3,178	3,561	3,216	2,986	2,948	2,871	2,986	3,063	3,369	3,407
15	JAWA TENGAH	630,500	57,376	52,962	52,332	58,637	52,962	49,179	48,549	47,288	49,179	50,440	55,484	56,115
16	JAWA TIMUR	825,240	75,097	69,320	68,495	76,747	69,320	64,369	63,543	61,893	64,369	66,019	72,621	73,446
17	B A L I	38,675	3,519	3,249	3,210	3,597	3,249	3,017	2,978	2,901	3,017	3,094	3,403	3,442
18	KALIMANTAN BARAT	26,650	2,425	2,239	2,212	2,478	2,239	2,079	2,052	1,999	2,079	2,132	2,345	2,372
19	KALIMANTAN TENGAH	10,985	1,000	923	912	1,022	923	857	846	824	857	879	967	978
20	KALIMANTAN SELATAN	30,485	2,774	2,561	2,530	2,835	2,561	2,378	2,347	2,286	2,378	2,439	2,683	2,713
21	KALIMANTAN TIMUR	14,235	1,295	1,196	1,182	1,324	1,196	1,110	1,096	1,068	1,110	1,139	1,253	1,267
22	SULAWESI UTARA	16,250	1,479	1,365	1,349	1,511	1,365	1,268	1,251	1,219	1,268	1,300	1,430	1,446
23	GORONTALO	11,505	1,047	966	955	1,070	966	897	886	863	897	920	1,012	1,024
24	SULAWESI TENGAH	26,390	2,401	2,217	2,190	2,454	2,217	2,058	2,032	1,979	2,058	2,111	2,322	2,349
25	SULAWESI TENGGARA	20,995	1,911	1,764	1,743	1,953	1,764	1,638	1,617	1,575	1,638	1,680	1,848	1,869
26	SULAWESI SELATAN	191,490	17,426	16,085	15,894	17,809	16,085	14,936	14,745	14,362	14,936	15,319	16,851	17,043
27	SULAWESI BARAT	11,245	1,023	945	933	1,046	945	877	866	843	877	900	990	1,001
28	NUSA TENGGARA BARAT	79,755	7,258	6,699	6,620	7,417	6,699	6,221	6,141	5,982	6,221	6,380	7,018	7,098
29	NUSA TENGGARA TIMUR	25,935	2,360	2,179	2,153	2,412	2,179	2,023	1,997	1,945	2,023	2,075	2,282	2,308
30	MALUKU	3,575	325	300	297	332	300	279	275	268	279	286	315	318
31	PAPUA	3,250	296	273	270	302	273	254	250	244	254	260	286	289
32	MALUKU UTARA	1,040	95	87	86	97	87	81	80	78	81	83	92	93
33	IRJA BARAT	975	89	82	81	91	82	76	75	73	76	78	86	87
	JUMLAH PROPINSI	3,315,000	301,665	278,460	275,145	308,295	278,460	258,570	255,255	248,625	258,570	265,200	291,720	295,035

Lampiran 3.3. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	8,738	795	734	725	813	734	682	673	655	682	699	769	778
2	SUMATERA UTARA	19,134	1,741	1,607	1,588	1,779	1,607	1,492	1,473	1,435	1,492	1,531	1,684	1,703
3	SUMATERA BARAT	7,585	690	637	630	705	637	592	584	569	592	607	668	675
4	J A M B I	4,286	390	360	356	399	360	334	330	321	334	343	377	381
5	R I A U	3,595	327	302	298	334	302	280	277	270	280	288	316	320
6	BENGKULU	2,765	252	232	230	257	232	216	213	207	216	221	243	246
7	SUMATERA SELATAN	21,079	1,918	1,771	1,750	1,960	1,771	1,644	1,623	1,581	1,644	1,686	1,855	1,876
8	BANGKA BELITUNG	1,843	168	155	153	171	155	144	142	138	144	147	162	164
9	LAMPUNG	33,319	3,032	2,799	2,765	3,099	2,799	2,599	2,566	2,499	2,599	2,666	2,932	2,965
10	KEP. RIAU	18	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2
11	DKI. JAKARTA	28	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
12	BANTEN	6,710	611	564	557	624	564	523	517	503	523	537	590	597
13	JAWA BARAT	76,307	6,944	6,410	6,333	7,097	6,410	5,952	5,876	5,723	5,952	6,105	6,715	6,791
14	D.I. YOGYAKARTA	5,429	494	456	451	505	456	423	418	407	423	434	478	483
15	JAWA TENGAH	89,404	8,136	7,510	7,421	8,315	7,510	6,973	6,884	6,705	6,973	7,152	7,868	7,957
16	JAWA TIMUR	117,018	10,649	9,829	9,712	10,883	9,829	9,127	9,010	8,776	9,127	9,361	10,298	10,415
17	B A L I	5,484	499	461	455	510	461	428	422	411	428	439	483	488
18	KALIMANTAN BARAT	3,779	344	317	314	351	317	295	291	283	295	302	333	336
19	KALIMANTAN TENGAH	1,558	142	131	129	145	131	121	120	117	121	125	137	139
20	KALIMANTAN SELATAN	4,323	393	363	359	402	363	337	333	324	337	346	380	385
21	KALIMANTAN TIMUR	2,018	184	170	168	188	170	157	155	151	157	161	178	180
22	SULAWESI UTARA	2,304	210	194	191	214	194	180	177	173	180	184	203	205
23	GORONTALO	1,631	148	137	135	152	137	127	126	122	127	131	144	145
24	SULAWESI TENGAH	3,742	341	314	311	348	314	292	288	281	292	299	329	333
25	SULAWESI TENGGARA	2,977	271	250	247	277	250	232	229	223	232	238	262	265
26	SULAWESI SELATAN	27,153	2,471	2,281	2,254	2,525	2,281	2,118	2,091	2,036	2,118	2,172	2,389	2,417
27	SULAWESI BARAT	1,595	145	134	132	148	134	124	123	120	124	128	140	142
28	NUSA TENGGARA BARAT	11,309	1,029	950	939	1,052	950	882	871	848	882	905	995	1,007
29	NUSA TENGGARA TIMUR	3,678	335	309	305	342	309	287	283	276	287	294	324	327
30	MALUKU	507	46	43	42	47	43	40	39	38	40	41	45	45
31	PAPUA	461	42	39	38	43	39	36	35	35	36	37	41	41
32	MALUKU UTARA	147	13	12	12	14	12	12	11	11	12	12	13	13
33	IRJA BARAT	138	13	12	11	13	12	11	11	10	11	11	12	12
	JUMLAH PROPINSI	470,061	42,776	39,485	39,015	43,716	39,485	36,665	36,195	35,255	36,665	37,605	41,365	41,835

Lampiran 3.4. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	20,917	1,903	1,757	1,736	1,945	1,757	1,631	1,611	1,569	1,631	1,673	1,841	1,862
2	SUMATERA UTARA	45,805	4,168	3,848	3,802	4,260	3,848	3,573	3,527	3,435	3,573	3,664	4,031	4,077
3	SUMATERA BARAT	18,159	1,652	1,525	1,507	1,689	1,525	1,416	1,398	1,362	1,416	1,453	1,598	1,616
4	J A M B I	10,260	934	862	852	954	862	800	790	769	800	821	903	913
5	R I A U	8.605	783	723	714	800	723	671	663	645	671	688	757	766
6	BENGKULU	6,619	602	556	549	616	556	516	510	496	516	530	582	589
7	SUMATERA SELATAN	50,460	4,592	4,239	4,188	4,693	4,239	3,936	3,885	3,784	3,936	4,037	4,440	4,491
8	BANGKA BELITUNG	4,413	402	371	366	410	371	344	340	331	344	353	388	393
9	LAMPUNG	79,761	7,258	6,700	6,620	7,418	6,700	6,221	6,142	5,982	6,221	6,381	7,019	7,099
10	KEP. RIAU	44	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4
11	DKI. JAKARTA	66	6	6	5	6	6	5	5	5	5	5	6	6
12	BANTEN	16,062	1.462	1,349	1,333	1,494	1,349	1,253	1,237	1,205	1,253	1,285	1,413	1,430
13	JAWA BARAT	182,666	16,623	15,344	15,161	16,988	15,344	14,248	14,065	13,700	14,248	14,613	16,075	16,257
14	D.I. YOGYAKARTA	12,996	1,183	1,092	1,079	1,209	1,092	1,014	1,001	975	1,014	1,040	1,144	1,157
15	JAWA TENGAH	214,019	19,476	17,978	17,764	19,904	17,978	16,693	16,479	16,051	16,693	17,122	18,834	19,048
16	JAWA TIMUR	280,122	25,491	23,530	23,250	26,051	23,530	21,850	21,569	21,009	21,850	22,410	24,651	24,931
17	B A L I	13,128	1,195	1,103	1,090	1,221	1,103	1,024	1,011	985	1,024	1,050	1,155	1,168
18	KALIMANTAN BARAT	9,046	823	760	751	841	760	706	697	678	706	724	796	805
19	KALIMANTAN TENGAH	3,729	339	313	309	347	313	291	287	280	291	298	328	332
20	KALIMANTAN SELATAN	10,348	942	869	859	962	869	807	797	776	807	828	911	921
21	KALIMANTAN TIMUR	4,832	440	406	401	449	406	377	372	362	377	387	425	430
22	SULAWESI UTARA	5.516	502	463	458	513	463	430	425	414	430	441	485	491
23	GORONTALO	3,905	355	328	324	363	328	305	301	293	305	312	344	348
24	SULAWESI TENGAH	8.958	815	752	744	833	752	699	690	672	699	717	788	797
25	SULAWESI TENGGARA	7.127	649	599	592	663	599	556	549	534	556	570	627	634
26	SULAWESI SELATAN	65.000	5.915	5,460	5.395	6.045	5,460	5.070	5,005	4.875	5.070	5.200	5,720	5,785
27	SULAWESI BARAT	3.817	347	321	317	355	321	298	294	286	298	305	336	340
28	NUSA TENGGARA BARAT	27.072	2.464	2,274	2,247	2,518	2,274	2.112	2.085	2.030	2,112	2,166	2,382	2,409
29	NUSA TENGGARA TIMUR	8.803	801	739	731	819	739	687	678	660	687	704	775	784
30	MALUKU	1,214	110	102	101	113	102	95	93	91	95	97	107	108
31	PAPUA	1,103	100	93	92	103	93	86	85	83	86	88	97	98
32	MALUKU UTARA	353	32	30	29	33	30	28	27	26	28	28	31	31
33	IRJA BARAT	331	30	28	27	31	28	26	25	25	26	26	29	29
	JUMLAH PROPINSI	1,125,255	102,398	94,521	93,396	104,649	94,521	87.770	86,645	84,394	87,770	90,020	99,022	100,148

Lampiran 3.5. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	280	25	24	23	26	24	22	22	21	22	22	25	25
2	SUMATERA UTARA	613	56	51	51	57	51	48	47	46	48	49	54	55
3	SUMATERA BARAT	243	22	20	20	23	20	19	19	18	19	19	21	22
4	J A M B I	137	12	12	11	13	12	11	11	10	11	11	12	12
5	R I A U	115	10	10	10	11	10	9	9	9	9	9	10	10
6	BENGKULU	89	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	8	8
7	SUMATERA SELATAN	675	61	57	56	63	57	53	52	51	53	54	59	60
8	BANGKA BELITUNG	59	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
9	LAMPUNG	1,068	97	90	89	99	90	83	82	80	83	85	94	95
10	KEP. RIAU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI. JAKARTA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	215	20	18	18	20	18	17	17	16	17	17	19	19
13	JAWA BARAT	2,445	222	205	203	227	205	191	188	183	191	196	215	218
14	D.I. YOGYAKARTA	174	16	15	14	16	15	14	13	13	14	14	15	15
15	JAWA TENGAH	2,865	261	241	238	266	241	223	221	215	223	229	252	256
16	JAWA TIMUR	3,749	341	315	311	349	315	292	289	281	292	300	330	334
17	B A L I	176	16	15	15	16	15	14	14	13	14	14	15	16
18	KALIMANTAN BARAT	121	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	11	11
19	KALIMANTAN TENGAH	50	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
20	KALIMANTAN SELATAN	139	13	12	11	13	12	11	11	10	11	11	12	13
21	KALIMANTAN TIMUR	65	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	6
22	SULAWESI UTARA	74	7	6	6	7	6	6	6	6	6	6	6	7
23	GORONTALO	52	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
24	SULAWESI TENGAH	120	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	11	11
25	SULAWESI TENGGARA	95	9	8	8	9	8	7	7	7	7	8	8	8
26	SULAWESI SELATAN	870	79	73	72	81	73	68	67	65	68	70	77	77
7	SULAWESI BARAT	51	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
28	NUSA TENGGARA BARAT	362	33	30	30	34	30	28	28	27	28	29	32	32
29	NUSA TENGGARA TIMUR	118	11	10	10	11	10	9	9	9	9	9	10	10
30	MALUKU	16	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
31	PAPUA	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	MALUKU UTARA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	IRJA BARAT	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PROPINSI	15,061	1,371	1,265	1,250	1,401	1,265	1,175	1,160	1,130	1,175	1,205	1,325	1,340

Lampiran 3.6. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	3,246	295	273	269	302	273	253	250	243	253	260	286	289
2	SUMATERA UTARA	7,108	647	597	590	661	597	554	547	533	554	569	626	633
3	SUMATERA BARAT	2,818	256	237	234	262	237	220	217	211	220	225	248	251
4	J A M B I	1,592	145	134	132	148	134	124	123	119	124	127	140	142
5	R I A U	1,335	122	112	111	124	112	104	103	100	104	107	118	119
6	BENGKULU	1,027	93	86	85	96	86	80	79	77	80	82	90	91
7	SUMATERA SELATAN	7,831	713	658	650	728	658	611	603	587	611	626	689	697
8	BANGKA BELITUNG	685	62	58	57	64	58	53	53	51	53	55	60	61
9	LAMPUNG	12,378	1,126	1,040	1,027	1,151	1,040	965	953	928	965	990	1,089	1,102
10	KEP. RIAU	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	2,493	227	209	207	232	209	194	192	187	194	199	219	222
13	JAWA BARAT	28,347	2,580	2,381	2,353	2,636	2,381	2,211	2,183	2,126	2,211	2,268	2,495	2,523
14	D.I. YOGYAKARTA	2,017	184	169	167	188	169	157	155	151	157	161	177	179
15	JAWA TENGAH	33,212	3,022	2,790	2,757	3,089	2,790	2,591	2,557	2,491	2,591	2,657	2,923	2,956
16	JAWA TIMUR	43,471	3,956	3,652	3,608	4,043	3,652	3,391	3,347	3,260	3,391	3,478	3,825	3,869
17	B A L I	2,037	185	171	169	189	171	159	157	153	159	163	179	181
18	KALIMANTAN BARAT	1,404	128	118	117	131	118	109	108	105	109	112	124	125
19	KALIMANTAN TENGAH	579	53	49	48	54	49	45	45	43	45	46	51	51
20	KALIMANTAN SELATAN	1,606	146	135	133	149	135	125	124	120	125	128	141	143
21	KALIMANTAN TIMUR	750	68	63	62	70	63	58	58	56	58	60	66	67
22	SULAWESI UTARA	856	78	72	71	80	72	67	66	64	67	68	75	76
23	GORONTALO	606	55	51	50	56	51	47	47	45	47	48	53	54
24	SULAWESI TENGAH	1,390	127	117	115	129	117	108	107	104	108	111	122	124
25	SULAWESI TENGGARA	1,106	101	93	92	103	93	86	85	83	86	88	97	98
26	SULAWESI SELATAN	10,087	918	847	837	938	847	787	777	757	787	807	888	898
27	SULAWESI BARAT	592	54	50	49	55	50	46	46	44	46	47	52	53
28	NUSA TENGGARA BARAT	4,201	382	353	349	391	353	328	323	315	328	336	370	374
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1,366	124	115	113	127	115	107	105	102	107	109	120	122
30	MALUKU	188	17	16	16	18	16	15	15	14	15	15	17	17
31	PAPUA	171	16	14	14	16	14	13	13	13	13	14	15	16
32	MALUKU UTARA	55	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5
33	IRJA BARAT	51	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
	JUMLAH PROPINSI	174,622	15,891	14,668	14,494	16,240	14,668	13,621	13,446	13,097	13,621	13,970	15,367	15,541

Lampiran 3.7. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	23,900	2,175	2,008	1,984	2,223	2,008	1,864	1,840	1,793	1,864	1,912	2,103	2,127
2	SUMATERA UTARA	60,800	5,533	5,107	5,046	5,654	5,107	4,742	4,682	4,560	4,742	4,864	5,350	5,411
3	SUMATERA BARAT	30,900	2,812	2,596	2,565	2,874	2,596	2,410	2,379	2,318	2,410	2,472	2,719	2,750
4	J A M B I	14,400	1,310	1,210	1,195	1,339	1,210	1,123	1,109	1,080	1,123	1,152	1,267	1,282
5	R I A U	10,300	937	865	855	958	865	803	793	773	803	824	906	917
6	BENGKULU	9,900	901	832	822	921	832	772	762	743	772	792	871	881
7	SUMATERA SELATAN	47,200	4,295	3,965	3,918	4,390	3,965	3,682	3,634	3,540	3,682	3,776	4,154	4,201
8	BANGKA BELITUNG	3,900	355	328	324	363	328	304	300	293	304	312	343	347
9	LAMPUNG	56,700	5,160	4,763	4,706	5,273	4,763	4,423	4,366	4,253	4,423	4,536	4,990	5,046
10	KEP. RIAU	160	15	13	13	15	13	12	12	12	12	13	14	14
11	DKI. JAKARTA	90	8	8	7	8	8	7	7	7	7	7	8	8
12	BANTEN	23,400	2,129	1,966	1,942	2,176	1,966	1,825	1,802	1,755	1,825	1,872	2,059	2,083
13	JAWA BARAT	184,900	16,826	15,532	15,347	17,196	15,532	14,422	14,237	13,868	14,422	14,792	16,271	16,456
14	D.I. YOGYAKARTA	7,400	673	622	614	688	622	577	570	555	577	592	651	659
15	JAWA TENGAH	175,100	15,934	14,708	14,533	16,284	14,708	13,658	13,483	13,133	13,658	14,008	15,409	15,584
16	JAWA TIMUR	215,000	19,565	18,060	17,845	19,995	18,060	16,770	16,555	16,125	16,770	17,200	18,920	19,135
17	B A L I	5,000	455	420	415	465	420	390	385	375	390	400	440	445
18	KALIMANTAN BARAT	13,000	1,183	1,092	1,079	1,209	1,092	1,014	1,001	975	1,014	1,040	1,144	1,157
19	KALIMANTAN TENGAH	5,000	455	420	415	465	420	390	385	375	390	400	440	445
20	KALIMANTAN SELATAN	10,000	910	840	830	930	840	780	770	750	780	800	880	890
21	KALIMANTAN TIMUR	7,000	637	588	581	651	588	546	539	525	546	560	616	623
22	SULAWESI UTARA	5,500	501	462	457	512	462	429	424	413	429	440	484	490
23	GORONTALO	1,700	155	143	141	158	143	133	131	128	133	136	150	151
24	SULAWESI TENGAH	5,400	491	454	448	502	454	421	416	405	421	432	475	481
25	SULAWESI TENGGARA	7,200	655	605	598	670	605	562	554	540	562	576	634	641
26	SULAWESI SELATAN	44,000	4,004	3,696	3,652	4,092	3,696	3,432	3,388	3,300	3,432	3,520	3,872	3,916
27	SULAWESI BARAT	3,000	273	252	249	279	252	234	231	225	234	240	264	267
28	NUSA TENGGARA BARAT	19,600	1,784	1,646	1,627	1,823	1,646	1,529	1,509	1,470	1,529	1,568	1,725	1,744
29	NUSA TENGGARA TIMUR	5,800	528	487	481	539	487	452	447	435	452	464	510	516
30	MALUKU	350	32	29	29	33	29	27	27	26	27	28	31	31
31	PAPUA	2,800	255	235	232	260	235	218	216	210	218	224	246	249
32	MALUKU UTARA	200	18	17	17	19	17	16	15	15	16	16	18	18
33	IRJA BARAT	400	36	34	33	37	34	31	31	30	31	32	35	36
	JUMLAH PROPINSI	1,000,000	91,000	84,000	83,000	93,000	84,000	78,000	77,000	75,000	78,000	80,000	88,000	89,000

Lampiran 3.8. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Tanaman Pangan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	13,783	1,254	1,158	1,144	1,282	1,158	1,075	1,061	1,034	1,075	1,103	1,213	1,227
2	SUMATERA UTARA	35,064	3,191	2,945	2,910	3,261	2,945	2,735	2,700	2,630	2,735	2,805	3,086	3,121
3	SUMATERA BARAT	17,820	1,622	1,497	1,479	1,657	1,497	1,390	1,372	1,337	1,390	1,426	1,568	1,586
4	J A M B I	8,305	756	698	689	772	698	648	639	623	648	664	731	739
5	R I A U	5,940	541	499	493	552	499	463	457	446	463	475	523	529
6	BENGKULU	5,709	520	480	474	531	480	445	440	428	445	457	502	508
7	SUMATERA SELATAN	27,221	2,477	2,287	2,259	2,532	2,287	2,123	2,096	2,042	2,123	2,178	2,395	2,423
8	BANGKA BELITUNG	2,249	205	189	187	209	189	175	173	169	175	180	198	200
9	LAMPUNG	32,699	2,976	2,747	2,714	3,041	2,747	2,551	2,518	2,452	2,551	2,616	2,878	2,910
10	KEP. RIAU	92	8	8	8	9	8	7	7	7	7	7	8	8
11	DKI. JAKARTA	52	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5
12	BANTEN	13,495	1,228	1,134	1,120	1,255	1,134	1,053	1,039	1,012	1,053	1,080	1,188	1,201
13	JAWA BARAT	106,633	9,704	8,957	8,851	9,917	8,957	8,317	8,211	7,998	8,317	8,531	9,384	9,490
14	D.I. YOGYAKARTA	4,268	388	358	354	397	358	333	329	320	333	341	376	380
15	JAWA TENGAH	100,982	9,189	8,482	8,381	9,391	8,482	7,877	7,776	7,574	7,877	8,079	8,886	8,987
16	JAWA TIMUR	123,992	11,283	10,415	10,291	11,531	10,415	9,671	9,547	9,299	9,671	9,919	10,911	11,035
17	B A L I	2,884	262	242	239	268	242	225	222	216	225	231	254	257
18	KALIMANTAN BARAT	7,497	682	630	622	697	630	585	577	562	585	600	660	667
19	KALIMANTAN TENGAH	2,884	262	242	239	268	242	225	222	216	225	231	254	257
20	KALIMANTAN SELATAN	5,767	525	484	479	536	484	450	444	433	450	461	508	513
21	KALIMANTAN TIMUR	4,037	367	339	335	375	339	315	311	303	315	323	355	359
22	SULAWESI UTARA	3,172	289	266	263	295	266	247	244	238	247	254	279	282
23	GORONTALO	980	89	82	81	91	82	76	75	74	76	78	86	87
24	SULAWESI TENGAH	3,114	283	262	258	290	262	243	240	234	243	249	274	277
25	SULAWESI TENGGARA	4,152	378	349	345	386	349	324	320	311	324	332	365	370
26	SULAWESI SELATAN	25,375	2,309	2,132	2,106	2,360	2,132	1,979	1,954	1,903	1,979	2,030	2,233	2,258
27	SULAWESI BARAT	1,730	157	145	144	161	145	135	133	130	135	138	152	154
28	NUSA TENGGARA BARAT	11,303	1,029	949	938	1,051	949	882	870	848	882	904	995	1,006
29	NUSA TENGGARA TIMUR	3,345	304	281	278	311	281	261	258	251	261	268	294	298
30	MALUKU	202	18	17	17	19	17	16	16	15	16	16	18	18
31	PAPUA	1,615	147	136	134	150	136	126	124	121	126	129	142	144
32	MALUKU UTARA	115	10	10	10	11	10	9	9	9	9	9	10	10
33	IRJA BARAT	231	21	19	19	21	19	18	18	17	18	18	20	21
	JUMLAH PROPINSI	576,708	52,480	48,444	47,867	53,634	48,444	44,983	44,407	43,253	44,983	46,137	50,750	51,327

Lampiran 3.9. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Hortikultura

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	1,170	106	98	97	109	98	91	90	88	91	94	103	104
2	SUMATERA UTARA	2,977	271	250	247	277	250	232	229	223	232	238	262	265
3	SUMATERA BARAT	1,513	138	127	126	141	127	118	117	113	118	121	133	135
4	J A M B I	705	64	59	59	66	59	55	54	53	55	56	62	63
5	R I A U	504	46	42	42	47	42	39	39	38	39	40	44	45
6	BENGKULU	485	44	41	40	45	41	38	37	36	38	39	43	43
7	SUMATERA SELATAN	2,311	210	194	192	215	194	180	178	173	180	185	203	206
8	BANGKA BELITUNG	191	17	16	16	18	16	15	15	14	15	15	17	17
9	LAMPUNG	2,776	253	233	230	258	233	217	214	208	217	222	244	247
10	KEP. RIAU	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BANTEN	1,146	104	96	95	107	96	89	88	86	89	92	101	102
13	JAWA BARAT	9,054	824	761	751	842	761	706	697	679	706	724	797	806
14	D.I. YOGYAKARTA	362	33	30	30	34	30	28	28	27	28	29	32	32
15	JAWA TENGAH	8,574	780	720	712	797	720	669	660	643	669	686	755	763
16	JAWA TIMUR	10,528	958	884	874	979	884	821	811	790	821	842	926	937
17	B A L I	245	22	21	20	23	21	19	19	18	19	20	22	22
18	KALIMANTAN BARAT	637	58	53	53	59	53	50	49	48	50	51	56	57
19	KALIMANTAN TENGAH	245	22	21	20	23	21	19	19	18	19	20	22	22
20	KALIMANTAN SELATAN	490	45	41	41	46	41	38	38	37	38	39	43	44
21	KALIMANTAN TIMUR	343	31	29	28	32	29	27	26	26	27	27	30	31
22	SULAWESI UTARA	269	25	23	22	25	23	21	21	20	21	22	24	24
23	GORONTALO	83	8	7	7	8	7	6	6	6	6	7	7	7
24	SULAWESI TENGAH	264	24	22	22	25	22	21	20	20	21	21	23	24
25	SULAWESI TENGGARA	353	32	30	29	33	30	27	27	26	27	28	31	31
26	SULAWESI SELATAN	2,155	196	181	179	200	181	168	166	162	168	172	190	192
27	SULAWESI BARAT	147	13	12	12	14	12	11	11	11	11	12	13	13
28	NUSA TENGGARA BARAT	960	87	81	80	89	81	75	74	72	75	77	84	85
29	NUSA TENGGARA TIMUR	284	26	24	24	26	24	22	22	21	22	23	25	25
30	MALUKU	17	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
31	PAPUA	137	12	12	11	13	12	11	11	10	11	11	12	12
32	MALUKU UTARA	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	IRJA BARAT	20	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
	JUMLAH PROPINSI	48,967	4,456	4,113	4,064	4,554	4,113	3,819	3,770	3,672	3,819	3,917	4,309	4,358

Lampiran 3.10. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Perkebunan (Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	7,198	655	605	597	669	605	561	554	540	561	576	633	641
2	SUMATERA UTARA	18,310	1,666	1,538	1,520	1,703	1,538	1,428	1,410	1,373	1,428	1,465	1,611	1,630
3	SUMATERA BARAT	9,306	847	782	772	865	782	726	717	698	726	744	819	828
4	J A M B I	4,337	395	364	360	403	364	338	334	325	338	347	382	386
5	R I A U	3,102	282	261	257	288	261	242	239	233	242	248	273	276
6	BENGKULU	2,981	271	250	247	277	250	233	230	224	233	239	262	265
7	SUMATERA SELATAN	14,215	1,294	1,194	1,180	1,322	1,194	1,109	1,095	1,066	1,109	1,137	1,251	1,265
8	BANGKA BELITUNG	1,175	107	99	97	109	99	92	90	88	92	94	103	105
9	LAMPUNG	17,076	1,554	1,434	1,417	1,588	1,434	1,332	1,315	1,281	1,332	1,366	1,503	1,520
10	KEP. RIAU	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	DKI. JAKARTA	27	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
12	BANTEN	7,047	641	592	585	655	592	550	543	529	550	564	620	627
13	JAWA BARAT	55,684	5,067	4,677	4,622	5,179	4,677	4,343	4,288	4,176	4,343	4,455	4,900	4,956
14	D.I. YOGYAKARTA	2,229	203	187	185	207	187	174	172	167	174	178	196	198
15	JAWA TENGAH	52,732	4,799	4,430	4,377	4,904	4,430	4,113	4,060	3,955	4,113	4,219	4,640	4,693
16	JAWA TIMUR	64,749	5,892	5,439	5,374	6,022	5,439	5,050	4,986	4,856	5,050	5,180	5,698	5,763
17	B A L I	1,506	137	126	125	140	126	117	116	113	117	120	133	134
18	KALIMANTAN BARAT	3,915	356	329	325	364	329	305	301	294	305	313	345	348
19	KALIMANTAN TENGAH	1,506	137	126	125	140	126	117	116	113	117	120	133	134
20	KALIMANTAN SELATAN	3,012	274	253	250	280	253	235	232	226	235	241	265	268
21	KALIMANTAN TIMUR	2,108	192	177	175	196	177	164	162	158	164	169	186	188
22	SULAWESI UTARA	1,656	151	139	137	154	139	129	128	124	129	133	146	147
23	GORONTALO	512	47	43	42	48	43	40	39	38	40	41	45	46
24	SULAWESI TENGAH	1,626	148	137	135	151	137	127	125	122	127	130	143	145
25	SULAWESI TENGGARA	2,168	197	182	180	202	182	169	167	163	169	173	191	193
26	SULAWESI SELATAN	13,251	1,206	1,113	1,100	1,232	1,113	1,034	1,020	994	1,034	1,060	1,166	1,179
27	SULAWESI BARAT	903	82	76	75	84	76	70	70	68	70	72	80	80
28	NUSA TENGGARA BARAT	5,903	537	496	490	549	496	460	455	443	460	472	519	525
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1,747	159	147	145	162	147	136	134	131	136	140	154	155
30	MALUKU	105	10	9	9	10	9	8	8	8	8	8	9	9
31	PAPUA	843	77	71	70	78	71	66	65	63	66	67	74	75
32	MALUKU UTARA	60	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5
33	IRJA BARAT	120	11	10	10	11	10	9	9	9	9	10	11	11
	JUMLAH PROPINSI	301,156	27,405	25,297	24,996	28,008	25,297	23,490	23,189	22,587	23,490	24,093	26,502	26,803

Lampiran 3.11. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011
Tanggal : 9 Desember 2011

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	32	2.9	2.7	2.7	3.0	2.7	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9
2	SUMATERA UTARA	82	7.5	6.9	6.8	7.6	6.9	6.4	6.3	6.2	6.4	6.6	7.2	7.3
3	SUMATERA BARAT	42	3.8	3.5	3.5	3.9	3.5	3.3	3.2	3.1	3.3	3.3	3.7	3.7
4	J A M B I	19	1.8	1.6	1.6	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7
5	R I A U	14	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
6	BENGKULU	13	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
7	SUMATERA SELATAN	64	5.8	5.3	5.3	5.9	5.3	5.0	4.9	4.8	5.0	5.1	5.6	5.7
8	BANGKA BELITUNG	5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
9	LAMPUNG	76	7.0	6.4	6.3	7.1	6.4	6.0	5.9	5.7	6.0	6.1	6.7	6.8
10	KEP. RIAU	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	DKI. JAKARTA	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	BANTEN	32	2.9	2.7	2.6	2.9	2.7	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	2.8	2.8
13	JAWA BARAT	249	22.7	21.0	20.7	23.2	21.0	19.5	19.2	18.7	19.5	20.0	22.0	22.2
14	D.I. YOGYAKARTA	10	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
15	JAWA TENGAH	236	21.5	19.8	19.6	22.0	19.8	18.4	18.2	17.7	18.4	18.9	20.8	21.0
16	JAWA TIMUR	290	26.4	24.4	24.1	27.0	24.4	22.6	22.3	21.8	22.6	23.2	25.5	25.8
17	B A L I	7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
18	KALIMANTAN BARAT	18	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
19	KALIMANTAN TENGAH	7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
20	KALIMANTAN SELATAN	13	1.2	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
21	KALIMANTAN TIMUR	9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
22	SULAWESI UTARA	7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
23	GORONTALO	2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
24	SULAWESI TENGAH	7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
25	SULAWESI TENGGARA	10	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
26	SULAWESI SELATAN	59	5.4	5.0	4.9	5.5	5.0	4.6	4.6	4.5	4.6	4.7	5.2	5.3
27	SULAWESI BARAT	4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
28	NUSA TENGGARA BARAT	26	2.4	2.2	2.2	2.5	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4
29	NUSA TENGGARA TIMUR	8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
30	MALUKU	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	PAPUA	4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
32	MALUKU UTARA	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	IRJA BARAT	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	JUMLAH PROPINSI	1,349	123	113	112	125	113	105	104	101	105	108	119	120

Lampiran 3.12. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor :
Tanggal :

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	N A D	1,716	156	144	142	160	144	134	132	129	134	137	151	153
2	SUMATERA UTARA	4,367	397	367	362	406	367	341	336	327	341	349	384	389
3	SUMATERA BARAT	2,219	202	186	184	206	186	173	171	166	173	178	195	198
4	J A M B I	1,034	94	87	86	96	87	81	80	78	81	83	91	92
5	R I A U	740	67	62	61	69	62	58	57	55	58	59	65	66
6	BENGKULU	711	65	60	59	66	60	55	55	53	55	57	63	63
7	SUMATERA SELATAN	3,390	308	285	281	315	285	264	261	254	264	271	298	302
8	BANGKA BELITUNG	280	25	24	23	26	24	22	22	21	22	22	25	25
9	LAMPUNG	4,072	371	342	338	379	342	318	314	305	318	326	358	362
10	KEP. RIAU	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	6	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
12	BANTEN	1,681	153	141	139	156	141	131	129	126	131	134	148	150
13	JAWA BARAT	13,279	1,208	1,115	1,102	1,235	1,115	1,036	1,023	996	1,036	1,062	1,169	1,182
14	D.I. YOGYAKARTA	531	48	45	44	49	45	41	41	40	41	43	47	47
15	JAWA TENGAH	12,576	1,144	1,056	1,044	1,170	1,056	981	968	943	981	1,006	1,107	1,119
16	JAWA TIMUR	15,441	1,405	1,297	1,282	1,436	1,297	1,204	1,189	1,158	1,204	1,235	1,359	1,374
17	B A L I	359	33	30	30	33	30	28	28	27	28	29	32	32
18	KALIMANTAN BARAT	934	85	78	77	87	78	73	72	70	73	75	82	83
19	KALIMANTAN TENGAH	359	33	30	30	33	30	28	28	27	28	29	32	32
20	KALIMANTAN SELATAN	718	65	60	60	67	60	56	55	54	56	57	63	64
21	KALIMANTAN TIMUR	503	46	42	42	47	42	39	39	38	39	40	44	45
22	SULAWESI UTARA	395	36	33	33	37	33	31	30	30	31	32	35	35
23	GORONTALO	122	11	10	10	11	10	10	9	9	10	10	11	11
24	SULAWESI TENGAH	388	35	33	32	36	33	30	30	29	30	31	34	35
25	SULAWESI TENGGARA	517	47	43	43	48	43	40	40	39	40	41	46	46
26	SULAWESI SELATAN	3,160	288	265	262	294	265	246	243	237	246	253	278	281
27	SULAWESI BARAT	215	20	18	18	20	18	17	17	16	17	17	19	19
28	NUSA TENGGARA BARAT	1,408	128	119	117	131	118	110	108	106	110	113	124	125
29	NUSA TENGGARA TIMUR	417	38	35	35	39	35	32	32	31	32	33	37	37
30	MALUKU	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	PAPUA	201	18	17	17	19	17	16	15	15	16	16	18	18
32	MALUKU UTARA	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	IRJA BARAT	29	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
	JUMLAH PROPINSI	71,819	6,536	6,033	5,961	6,679	6,033	5,602	5,530	5,386	5,602	5,746	6,320	6,392